



Menuju Labuhan Merapat di Tanah Harapan

Saatnya sauh yang tadi terangkat dari dasar lautan kembali disiapkan. Layangkan pandang ke depan dimana daratan sudah siap mengucapkan selamat datang. Berjuta asa menanti di balik keramahan dan dinamika hidup penduduknya. Bukan berarti berhenti, namun sejenak menjejakkan kaki sebelum kembali dengan perkasa mengarungi bahari.





BAB

VI

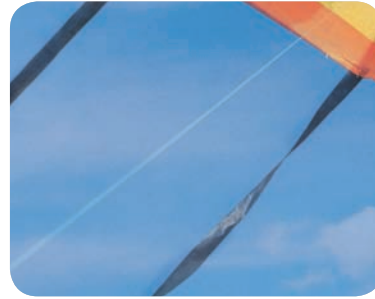
PROSPEK EKONOMI DAN ARAH
KEBIJAKAN BANK INDONESIA



Prospek Ekonomi dan Arah Kebijakan Bank Indonesia

Di tengah kuatnya tekanan yang bersumber dari krisis perekonomian global, berbagai pencapaian positif yang mampu diraih perekonomian Indonesia pada tahun 2009 telah semakin menguatkan optimisme akan berlanjutnya proses perbaikan kondisi perekonomian ke depan. Hasil-hasil positif tersebut antara lain pulihnya stabilitas sistem keuangan, menguatnya nilai tukar rupiah, rendahnya tingkat inflasi, dan cukup tingginya pertumbuhan ekonomi. Optimisme terhadap perbaikan prospek perekonomian semakin diperkuat dengan prospek ekonomi global yang diperkirakan semakin kondusif.

Meskipun diwarnai optimisme, dinamika perekonomian ke depan masih dihadapkan pada sejumlah tantangan yang berpotensi menghambat akselerasi perbaikan ekonomi. Dari sisi eksternal, tantangan terutama berkaitan dengan dampak dari strategi mengakhiri langkah kebijakan yang ditempuh pada masa krisis (exit strategy), yang antara lain berupa pelonggaran likuiditas dan ekspansi fiskal di negara maju. Tantangan eksternal juga berhubungan dengan terjadinya kecenderungan polarisasi perdagangan dunia, serta masih tingginya ketidakseimbangan dalam kinerja perekonomian global. Dari sisi domestik, tantangan berkaitan dengan beberapa permasalahan yang masih dapat mengganggu efektivitas kebijakan moneter, seperti akses likuiditas perbankan yang masih cukup besar, masih besarnya peranan investasi portofolio dalam struktur aliran modal masuk, potensi penggelembungan harga aset di pasar keuangan,



pasar keuangan yang dangkal, dan berbagai permasalahan struktural di sektor riil.

Dengan pijakan awal yang kokoh dari pencapaian kinerja perekonomian tahun sebelumnya, dan sejalan dengan prakiraan membaiknya kondisi perekonomian global, serta dukungan berbagai kebijakan yang akan ditempuh guna menyikapi berbagai tantangan dalam perekonomian, maka prospek ekonomi ke depan diperkirakan semakin baik. Peningkatan kinerja makroekonomi ini juga didukung oleh tetap terjaganya stabilitas harga maupun sistem keuangan yang merupakan fondasi utama ketahanan perekonomian secara keseluruhan. Pada tahun 2010 momentum percepatan pertumbuhan ekonomi akan mulai diraih kembali dengan pertumbuhan PDB diperkirakan mencapai 5,5%-6,0% (yoy). Meskipun pertumbuhan ekonomi meningkat, tekanan terhadap inflasi diperkirakan tetap terkendali dan berada pada kisaran sasaran inflasi 2010 sebesar 5%±1% (yoy). Sementara itu, mulai bergulirnya proses pemulihan perekonomian global berdampak positif terhadap prakiraan NPI pada 2010. Neraca transaksi berjalan akan kembali mencatat surplus yang terutama didorong oleh peningkatan kinerja ekspor barang dan jasa. Di neraca transaksi modal dan finansial, struktur aliran modal masuk diperkirakan membaik. Arus dana masuk dari penanaman modal asing diperkirakan meningkat sejalan dengan optimisme akan prospek perekonomian ke depan. Sementara itu, arus dana masuk dalam bentuk portofolio juga akan terus terjadi, meski dalam skala yang lebih

terbatas dibandingkan dengan periode-periode sebelumnya. Dengan perkembangan tersebut, keseluruhan NPI pada tahun 2010 diperkirakan tetap mencatat surplus 12,5 miliar dolar AS sehingga cadangan devisa pada akhir tahun 2010 diperkirakan sebesar 78,5 miliar dolar AS atau setara dengan 6,4 bulan impor dan pembayaran utang luar negeri Pemerintah. Sejalan dengan prakiraan positif di neraca pembayaran, nilai tukar rupiah pada tahun 2010 secara umum diperkirakan bergerak stabil dengan kecenderungan sedikit lebih menguat dibandingkan tahun 2009.

Dalam perspektif yang lebih panjang, prakiraan perekonomian akan semakin baik seiring dengan peningkatan akumulasi kapital serta perbaikan tingkat produktivitas maupun efisiensi. Peningkatan akumulasi kapital, selain akan meningkatkan kapasitas perekonomian domestik, pada dasarnya juga merupakan sumber penciptaan pendapatan di masyarakat. Sementara itu, peningkatan produktivitas perekonomian yang tercermin pada membaiknya TFP diyakini merupakan aspek yang pada akhirnya akan mampu membawa perekonomian ke lintasan pertumbuhan yang lebih tinggi dalam jangka panjang. Dorongan dari sumber-sumber pertumbuhan ekonomi ini akan memungkinkan upaya mengakselerasi pertumbuhan ekonomi diikuti oleh terkendalinya tekanan inflasi dan terjaganya stabilitas sistem keuangan. Dalam kondisi tersebut, akselerasi pertumbuhan ekonomi terus meningkat dan diperkirakan dapat tumbuh

pada kisaran 6,5% – 7,5% (yoy) pada tahun 2014, yang dibarengi dengan tingkat inflasi yang mampu dikendalikan ke arah sasaran inflasi jangka menengah 4% $\pm$ 1% (yoy).

Menyikapi berbagai tantangan yang berpotensi menghambat akselerasi perbaikan ekonomi, maka untuk mencapai prospek ekonomi tersebut perlu didukung oleh berbagai kebijakan. Dari perspektif kebijakan Pemerintah, pencapaian kinerja perekonomian yang lebih baik sulit dilakukan tanpa adanya perbaikan terhadap berbagai permasalahan struktural yang selama ini belum tertangani secara optimal. Berbagai permasalahan struktural seperti: permasalahan infrastruktur, iklim investasi dan usaha, serta kualitas sumber daya manusia, telah mendapat perhatian khusus dari Pemerintah sebagaimana yang tertuang dalam Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJMN)

tahun 2010-2014. Dalam jangka pendek, berbagai langkah kebijakan yang ditempuh diharapkan akan mengatasi berbagai sumbatan (bottlenecking) yang selama ini menghambat kegiatan investasi. Dalam jangka yang lebih panjang, berbagai terobosan di sektor riil tersebut diharapkan dapat meningkatkan daya saing perekonomian secara keseluruhan, khususnya melalui peningkatan kualitas individu (human capital). Sementara itu, kebijakan yang akan ditempuh oleh Bank Indonesia diarahkan untuk menjaga stabilitas makroekonomi dan stabilitas sistem keuangan, serta mendorong fungsi intermediasi perbankan guna mendukung upaya peningkatan pertumbuhan ekonomi secara berkesinambungan. Koordinasi Pemerintah dan Bank Indonesia akan terus ditingkatkan antara lain dengan mengoptimalkan berbagai forum yang ada baik di pusat maupun di daerah seperti optimalisasi TPI/TPID.



Prospek Perekonomian

6.1

■ Asumsi yang Digunakan

Proyeksi ekonomi Indonesia ini disusun atas dasar sejumlah asumsi, baik eksternal maupun domestik. Dari sisi eksternal, asumsi yang digunakan terkait dengan prakiraan beberapa variabel perekonomian global yang memiliki keterkaitan dengan perekonomian Indonesia, di antaranya volume perdagangan dunia dan harga migas maupun nonmigas. Dari sisi domestik, asumsi yang digunakan antara lain adalah asumsi yang terkait defisit fiskal dan asumsi dijalankannya berbagai kebijakan yang terkait dengan perbaikan iklim investasi.

Asumsi Perekonomian Global

Pertumbuhan Ekonomi dan Volume Perdagangan Dunia

Memasuki paruh kedua tahun 2009, tanda-tanda proses pemulihan perekonomian global mulai terlihat. Penurunan pertumbuhan ekonomi global sebagai dampak krisis berakhir pada triwulan I 2009, dan selanjutnya perekonomian global diperkirakan mulai tumbuh positif pada tahun 2010. Prakiraan tersebut didukung oleh berbagai faktor, antara lain semakin pulihnya kondisi sektor keuangan global yang dibarengi dengan kebijakan makroekonomi yang diharapkan tetap akomodatif hingga proses pemulihan telah dianggap cukup stabil.

Dengan latar belakang ini, pertumbuhan negara maju yaitu AS, Eropa, dan Jepang pada tahun 2010 diperkirakan mencapai sekitar 2,7%, 1,0%, dan 1,7%.¹¹² Sementara

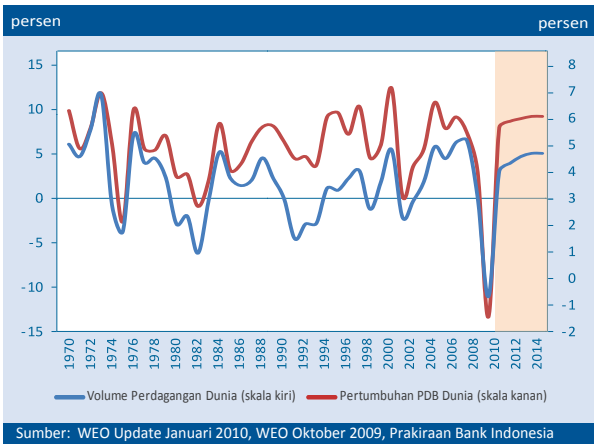
¹¹² *World Economic Outlook Update*, IMF, Januari 2010.

itu, negara-negara di kawasan Asia diperkirakan menjadi penggerak utama pemulihan ekonomi global yang dimotori oleh China dan India. Pada tahun 2010, pertumbuhan ekonomi China diperkirakan tumbuh sebesar 10,0% dan India diperkirakan sebesar 7,7%. Pesatnya pemulihan ekonomi China dan India diperkirakan dibarengi dengan peningkatan impor negara-negara tersebut, sehingga ekspor negara-negara Asia diperkirakan terus meningkat. Membaiknya kinerja eksternal tersebut akan disertai dengan pemulihan konsumsi di Asia sehingga berpotensi menjadikan ekonomi Asia untuk pulih lebih cepat dibandingkan dengan kawasan lain.

Dalam jangka menengah, pertumbuhan ekonomi negara maju diharapkan akan kembali ke tingkat sebelum krisis global. Perekonomian AS diperkirakan menuju kisaran 2,1%, sedangkan perekonomian negara-negara di kawasan Eropa diharapkan mampu tumbuh sebesar 2,1% pada tahun 2014, mendekati tingkat pertumbuhannya pada tahun 2007.¹¹³ Sementara itu negara-negara berkembang terutama China dan India yang hingga saat ini masih mampu tumbuh tinggi diperkirakan masing-masing mencapai pertumbuhan sebesar 9,5% dan 8,1% pada tahun 2014.

Mencermati adanya pola hubungan yang positif antara pertumbuhan ekonomi dengan pertumbuhan volume perdagangan sebagaimana tercermin dari pergerakan data historis kedua variabel tersebut, maka pada tahun 2010 Bank Indonesia memprakirakan volume perdagangan dunia tumbuh sekitar 8,0% (yoy). Selanjutnya pertumbuhan volume perdagangan dunia secara gradual

113 *World Economic Outlook*, IMF, Oktober 2009.



Grafik 6.1. Pertumbuhan Ekonomi dan Volume Perdagangan Dunia

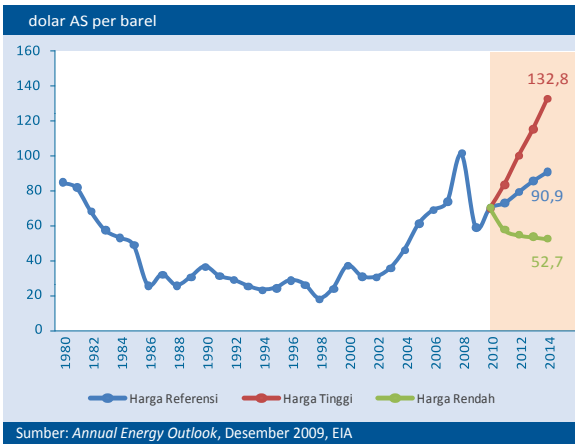
akan terus meningkat hingga mencapai sekitar 9,2% pada pada tahun 2014 (Grafik 6.1).

Harga Komoditas Dunia

Sejalan dengan membaiknya pertumbuhan ekonomi global, tren penurunan harga komoditas diperkirakan berakhir pada tahun 2010. Harga minyak mentah jenis Minas tahun 2010 diperkirakan terus meningkat dan mencapai level sekitar 80 dolar AS per barel. Hal tersebut sejalan dengan proyeksi IMF¹¹⁴ yang memprakirakan rata-rata harga minyak dunia tahun 2010 akan naik sebesar 22,6% atau ke level 76,0 dolar AS per barel. Selain karena menguatnya kembali permintaan, dinamika harga minyak dunia juga seringkali dipengaruhi oleh kegiatan spekulasi di pasar komoditas global.

Ke depan, harga minyak diperkirakan tetap berada dalam tren peningkatan sejalan dengan terus membaiknya pertumbuhan ekonomi global. Namun demikian, prakiraan adanya perbaikan pada kapasitas suplai minyak dalam beberapa periode ke depan akan menyebabkan akselerasi kenaikan harga minyak dunia cenderung tertahan. *Energy Information Administration* (EIA) memprakirakan harga minyak dunia dalam jangka yang lebih panjang (tahun 2009 – 2030) dalam tiga skenario, yakni harga tinggi, harga referensi (*baseline*), dan harga rendah.¹¹⁵ Lintasan harga minyak yang cenderung tinggi mencerminkan pasar minyak dunia yang menghadapi berbagai kendala seperti masalah politik, adanya kuota produksi, dan isu nasionalisasi, sehingga harga bergerak menuju 132,8 dolar AS per barel pada tahun 2014. Lintasan harga minyak

114 *World Economic Outlook Update*, IMF, Januari 2010.
115 *Annual Energy Outlook*, Desember 2009, EIA.



Grafik 6.2 Prakiraan Harga Minyak Dunia

dunia yang cenderung rendah, yaitu berada pada kisaran 52,7 dolar AS per barel, menggambarkan pasar minyak dunia yang didukung oleh membaiknya produksi minyak non-OPEC serta meningkatnya partisipasi swasta dalam pengembangan sumber daya minyak. Sementara itu, harga *baseline* minyak dunia pada tahun 2014 diperkirakan mencapai 90,9 dolar AS per barel (Grafik 6.2). Berdasarkan berbagai informasi tersebut, maka Bank Indonesia memprakirakan harga minyak berada dalam tren peningkatan hingga mendekati 100 dolar AS per barrel pada tahun 2014.

Sementara itu, harga komoditas nonmigas pada tahun 2010 diperkirakan juga bergerak naik sejalan dengan meningkatnya permintaan global dan kenaikan harga migas. Ekspansi sektor industri global di hampir sebagian besar negara akan meningkatkan permintaan terhadap komoditas terutama bahan baku seperti batubara, *crude palm oil* (CPO), nikel dan barang tambang lainnya yang pada akhirnya akan mendorong melonjaknya harga komoditas. Selain bahan baku, komoditas pangan diperkirakan juga mengalami kecenderungan peningkatan harga. Meskipun demikian, tekanan harga pada komoditas pangan ke depan diperkirakan tidak terlalu kuat mengingat elastisitas permintaan produk pangan yang relatif kurang sensitif terhadap siklus bisnis serta prakiraan bagusya hasil panen global dalam jangka pendek ke depan. Meskipun demikian, dalam jangka menengah risiko terhadap peningkatan harga pangan masih tetap ada terkait dengan adanya kemungkinan gangguan cuaca yang dapat mengganggu kecukupan stok pangan global di tengah prakiraan meningkatnya permintaan global. Berdasarkan berbagai kondisi di atas, Bank Indonesia memprakirakan harga komoditas nonmigas kembali memasuki fase peningkatan pada tahun 2010 dengan mencapai peningkatan sekitar 13% (yoy). Selanjutnya tekanan harga nonmigas diperkirakan sedikit berkurang dan kemudian cenderung lebih stabil dalam jangka panjang.

Inflasi Dunia

Prakiraan pulihnya permintaan global yang selanjutnya mendorong kenaikan harga berbagai komoditas, pada akhirnya akan memicu tekanan inflasi global. Pada tahun 2010, tekanan inflasi di negara maju diperkirakan mencapai 1,3% (yoy), dari sekitar 0% pada tahun 2009.¹¹⁶ Meskipun diwarnai oleh kecenderungan turunnya tingkat upah di negara maju, namun melambungnya

116 *World Economic Outlook Update*, IMF, Januari 2010.

kembali harga komoditas khususnya minyak, diperkirakan menyebabkan laju inflasi tetap meningkat. Di negara berkembang, laju inflasi pada tahun 2010 diperkirakan mencapai sekitar 6,2% (yoy) dari 5,2% pada tahun 2009. Peningkatan laju inflasi di negara berkembang ini terutama dipicu oleh permasalahan terbatasnya kapasitas perekonomian dan prakiraan meningkatnya aliran modal masuk. Dalam jangka menengah, inflasi di negara maju diperkirakan berangsur kembali ke kisaran sebelum krisis global. Di AS, tekanan inflasi diperkirakan secara perlahan akan mencapai sekitar 2,0% pada tahun 2014. Di negara berkembang, inflasi diperkirakan menurun dan mencapai sekitar 4,0% pada tahun 2014.¹¹⁷

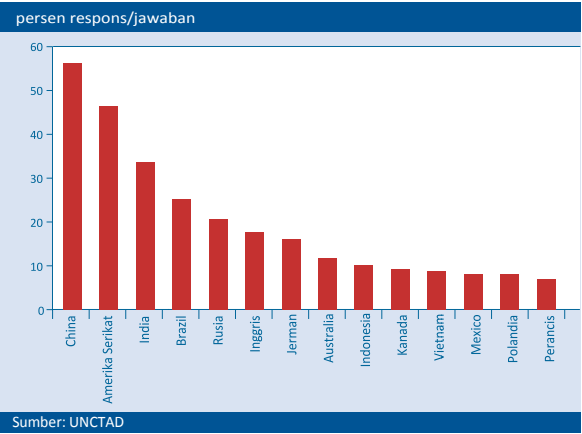
Prakiraan munculnya tekanan inflasi secara global menyebabkan bank sentral di berbagai negara ke depan mulai mempertimbangkan arah kebijakan moneter ketat. Meskipun demikian, masih tingginya ketidakpastian serta proses pemulihan ekonomi yang belum stabil memberikan tantangan yang tidak mudah bagi pengambil kebijakan di seluruh dunia.¹¹⁸ Dalam jangka pendek, prioritas pengambilan kebijakan masih tetap akan diarahkan pada upaya mempertahankan stabilitas sistem keuangan dengan tetap akomodatif dalam mendukung pemulihan ekonomi. Terkait dengan hal tersebut, secara umum suku bunga global dalam jangka pendek ke depan diperkirakan masih dipertahankan rendah. Arah kebijakan moneter yang mulai ketat secara umum diperkirakan terjadi pada pertengahan tahun 2010, sejalan dengan prakiraan semakin mantapnya proses pemulihan ekonomi di berbagai negara.

Aliran Foreign Direct Investment (FDI) Global

Sejalan dengan pemulihan perekonomian global, hasil survei mengindikasikan aliran FDI global dalam jangka pendek masih akan mengalami dampak negatif dari krisis.¹¹⁹ Meskipun demikian, secara bertahap aliran FDI global akan pulih dan tumbuh positif pada tahun 2011 seiring dengan ekspektasi membaiknya perekonomian negara yang menjadi tujuan FDI global dan meningkatnya minat investor untuk menanamkan kembali modalnya di berbagai negara.

Untuk Indonesia, dengan asumsi adanya perbaikan iklim investasi dan pembenahan infrastruktur, maka Indonesia

117 *World Economic Outlook*, IMF, Oktober 2009.
118 Selengkapnya lihat Bab 2. Pemulihan Ekonomi Global dan Tantangan ke Depan.
119 *World Investment Prospect* 2009 – 2011, UNCTAD.



Grafik 6.3 Wilayah-wilayah Paling Menarik untuk Lokasi FDI tahun 2009 - 2011

berpeluang untuk meraih aliran masuk FDI global tersebut. Hal ini diperkuat oleh hasil survei yang menunjukkan Indonesia menempati urutan ke 9 dari 15 wilayah yang paling diminati oleh investor asing untuk menanamkan modalnya (Grafik 6.3).¹²⁰ Beberapa faktor yang menjadi daya tarik Indonesia adalah pertumbuhan dan ukuran pasar, akses terhadap sumber daya alam, serta upah tenaga kerja yang murah (Grafik 6.4).

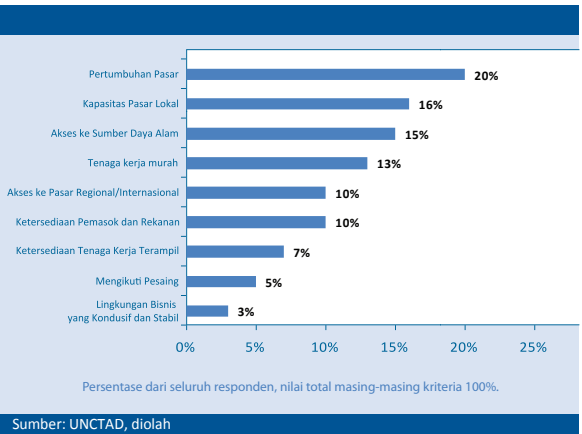
Masuknya aliran FDI global sebagai salah satu alternatif pembiayaan investasi diperkirakan dapat mendorong upaya peningkatan akumulasi kapital. Lebih jauh, FDI global diharapkan juga menjadi jembatan masuknya teknologi maupun inovasi yang pada gilirannya akan meningkatkan produktivitas maupun tingkat efisiensi perekonomian.

Asumsi Perekonomian Domestik

Kebijakan Fiskal

Seiring dengan ekspektasi perbaikan kondisi perekonomian pada tahun 2010, APBN tahun 2010 disusun untuk mendukung upaya percepatan pemulihan ekonomi nasional dengan tetap menjaga kesinambungan program-program perbaikan dan perlindungan kesejahteraan rakyat. Ekspektasi perbaikan kondisi perekonomian tercermin pada asumsi yang digunakan dalam APBN tahun 2010 tersebut. Pemerintah mengasumsikan perekonomian tumbuh sebesar 5,5%, lebih tinggi dari pertumbuhan ekonomi tahun 2009 sebesar 4,5%. Di sisi harga, kenaikan inflasi tahun 2010

120 Ibid.



Grafik 6.4 Faktor-faktor yang Mendorong FDI di Indonesia

diasumsikan sebesar 5% dan rata-rata suku bunga SBI 3 bulan sebesar 6,5%. Dari sisi eksternal, harga minyak mentah dunia diasumsikan sebesar 65 dolar AS per barel.

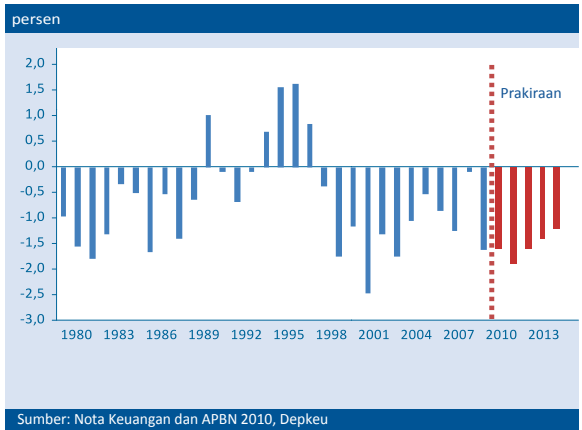
Asumsi pertumbuhan ekonomi yang meningkat pada tahun 2010 akan menyebabkan struktur APBN membaik dibandingkan dengan kondisi pada 2009. Dengan kondisi APBN yang membaik tersebut, Pemerintah berencana memberikan berbagai stimulus ke perekonomian, baik di sisi penerimaan maupun pengeluaran. Di sisi penerimaan, Pemerintah tetap akan melanjutkan beberapa insentif fiskal yang telah diberikan pada tahun sebelumnya untuk mendorong revitalisasi industri dan pemulihan dunia usaha. Insentif fiskal tersebut antara lain diberikan dalam bentuk penurunan tarif PPh Badan, pemberian fasilitas PPh Badan untuk perusahaan masuk bursa, serta kebijakan pajak ditanggung Pemerintah (DTP).

Di sisi pengeluaran, Pemerintah akan menjalankan berbagai program yang bertujuan untuk memberi stimulus terhadap kegiatan perekonomian. Program-program tersebut antara lain dengan meneruskan berbagai program kesejahteraan rakyat seperti Program Nasional Pemberdayaan Masyarakat (PNPM), Bantuan Operasional Sekolah, Jaminan Kesehatan Masyarakat, Raskin, dan Program Keluarga Harapan. Selain itu, Pemerintah juga akan melanjutkan pembangunan infrastruktur, meneruskan reformasi birokrasi, meningkatkan anggaran TNI, mempertahankan anggaran pendidikan minimal 20% dari belanja negara, dan mempertahankan pendapatan riil aparatur negara dan pensiunannya. Pendapatan riil tersebut dipertahankan melalui kenaikan gaji pokok PNS dan pensiun sebesar 5%, serta pemberian gaji ke-13.

Tabel 6.1. APBN 2010

	2010	
	APBN (triliun rupiah)	% PDB
A. Total Penerimaan dan Hibah	949,7	15,9
I. Penerimaan Perpajakan	742,7	12,4
1. Pajak Dalam Negeri	715,5	12,0
a. Pajak Penghasilan	351,0	5,9
1. Migas	47,0	0,8
2. Nonmigas	303,9	5,1
b. PPN/PPnBM	269,5	4,5
c. Pajak Bumi dan Bangunan	26,5	0,4
d. Bea Perolehan Hak Atas Tanah dan Bangunan	7,4	0,1
e. Cukai	57,3	1,0
f. Pajak Lainnya	3,9	0,1
2. Pajak Perdagangan Internasional	27,2	0,5
a. Bea Masuk	19,6	0,3
b. Pajak/Pungutan Ekspor	7,6	0,1
II. Penerimaan Negara Bukan Pajak (PNBP)	205,4	3,4
1. Penerimaan SDA	132,0	2,2
1. Minyak Bumi dan Gas Bumi	120,5	2,0
2. Nonmigas	11,5	0,2
2. Bagian Laba BUMN	24,0	0,4
3. Surplus BI/Pendapatan BLU	9,5	0,2
4. PNBP Lainnya	39,9	0,7
III. Hibah	1,5	0,0
B. Belanja Negara	1.047,6	17,5
I. Belanja Pemerintah Pusat	725,2	12,1
antara lain Subsidi	157,8	2,6
a. Subsidi BBM	68,7	1,1
b. Subsidi Non-BBM	89,1	1,5
II. Belanja Untuk Daerah	322,4	5,4
1. Dana Perimbangan	306,0	5,1
a. Dana Bagi Hasil	81,4	1,4
b. Dana Alokasi Umum	203,5	3,4
c. Dana Alokasi Khusus	21,1	0,4
2. Dana Otonomi Khusus & Penyesuaian	16,4	0,3
C. Keseimbangan Primer	17,6	0,3
Surplus/Defisit Anggaran	-98,0	-1,6
D. Pembiayaan	98,0	1,6
I. Pembiayaan Dalam Negeri	107,9	1,8
1. Perbankan Dalam Negeri	7,1	0,1
2. Non-Perbankan Dalam Negeri	100,8	1,7
antara lain Penjualan Obligasi Pemerintah, neto	104,4	1,7
II. Pembiayaan Luar Negeri (Neto)	-9,9	-0,2

Sumber : APBN 2010, Depkeu



Grafik 6.5 Perkembangan dan Prakiraan Defisit Fiskal

Dengan asumsi makroekonomi di atas serta berbagai program di sisi penerimaan dan pengeluaran tersebut, defisit APBN tahun 2010 diprakirakan sebesar 98 triliun rupiah, atau 1,6% dari PDB (Tabel 6.1). Defisit akan dibiayai oleh pembiayaan utang dan nonutang. Pembiayaan utang bersumber dari penerbitan neto SBN, pinjaman pada perbankan dalam negeri, dan pembayaran neto pinjaman luar negeri. Sementara itu, pembiayaan dari nonutang terutama bersumber dari penggunaan simpanan Pemerintah di Bank Indonesia.

Dalam jangka menengah, defisit fiskal diprakirakan menurun secara bertahap hingga mencapai 1,2% terhadap PDB pada tahun 2014 (Grafik 6.5). Prakiraan tersebut didasarkan pada sejumlah asumsi eksternal yakni perekonomian dunia mampu tumbuh moderat, harga minyak mentah relatif stabil pada kisaran 70–85 dolar AS per barel, inflasi dan suku bunga AS yang cenderung membaik, dan laju inflasi negara mitra dagang yang relatif stabil.¹²¹ Selain itu, kondisi perekonomian domestik diasumsikan juga cukup kondusif didukung oleh tetap terjaganya konsolidasi fiskal dalam rangka tetap menjaga kesinambungan fiskal, penyerapan Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran (DIPA) yang diupayakan semakin tinggi, menurunnya rasio utang terhadap PDB, dan pembangunan infrastruktur yang semakin meningkat.

Kebijakan di Sektor Riil

Pencapaian kinerja perekonomian yang lebih baik sulit dilakukan tanpa adanya perbaikan terhadap berbagai permasalahan struktural yang selama ini belum tertangani

121 Berdasarkan Kerangka APBN Jangka Menengah yang tercantum dalam Nota Keuangan dan APBN 2010.

secara optimal. Berbagai permasalahan struktural ini telah mendapat perhatian khusus dari Pemerintah, sebagaimana yang tertuang dalam RPJMN tahun 2010-2014. Terkait hal tersebut, pelaksanaan program pembangunan ekonomi dalam 5 (lima) tahun ke depan akan difokuskan pada 6 (enam) arah pembangunan, yaitu pembangunan infrastruktur, ketahanan pangan, ketahanan energi, pengembangan UMKM, revitalisasi industri dan jasa, serta pembangunan transportasi. Keenam arah pembangunan tersebut dijabarkan dalam berbagai program dan rencana aksi dengan masing-masing jadwal dan target waktu pelaksanaan.¹²²

Berbagai program dan rencana aksi di atas, apabila dapat terimplementasi dengan baik, diyakini akan memberikan kontribusi signifikan terhadap proses pembangunan ekonomi ke depan. Dalam jangka pendek, langkah-langkah tersebut diharapkan akan mengatasi berbagai sumbatan (*bottlenecking*) yang selama ini menghambat kegiatan investasi. Dalam jangka yang lebih panjang, berbagai terobosan di sektor riil tersebut diprakirakan dapat meningkatkan produktivitas dan daya saing perekonomian secara keseluruhan. Dalam era dimana dinamika perekonomian domestik semakin tidak dapat dilepaskan dari perekonomian global, peningkatan daya saing perekonomian domestik menjadi sangat penting untuk diupayakan. Hal ini guna menjaga agar Indonesia dapat ikut menuai keuntungan dari semakin terintegrasinya perekonomian domestik dengan perekonomian global. Di kawasan regional, peningkatan daya saing perekonomian diperlukan guna menghadapi era Masyarakat Ekonomi ASEAN (MEA) pada tahun 2015 (lihat Boks: Kemajuan Kesiapan Menghadapi MEA). Terkait dengan peningkatan produktivitas manusia sebagai pelaku ekonomi, Pemerintah diharapkan dapat mengoptimalkan peran aktifnya khususnya pada penyediaan aspek-aspek paling mendasar. Aspek-aspek tersebut berupa peningkatan akses terhadap pendidikan dan layanan kesehatan, terutama untuk lapisan masyarakat yang paling membutuhkan.

■ Prospek Perekonomian tahun 2010

Perekonomian Indonesia pada tahun 2010 diprakirakan telah kembali berada dalam fase pertumbuhan ekonomi yang meningkat. Meskipun diwarnai oleh masih belum

122 Dikutip dari hasil Musyawarah RPJMN Tahun 2010-2014, Desember 2009 (sumber : Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian Indonesia).

Tabel 6.2 Angka Prakiraan Indikator Utama Perekonomian 2010

Komponen	Satuan	2009	2010*
Produk Domestik Bruto	%y-o-y	4,5	5,5 - 6,0
Konsumsi Rumah Tangga	%y-o-y	4,9	4,5 - 5,0
Konsumsi Pemerintah	%y-o-y	15,7	5,9 - 6,9
Pembentukan Modal Tetap Domestik Bruto	%y-o-y	3,3	8,8 - 9,3
Ekspor Barang dan Jasa	%y-o-y	-9,7	10,2 - 11,0
Impor Barang dan Jasa	%y-o-y	-15,0	12,5 - 13,5
Inflasi IHK**	%y-o-y	2,78	5,0 ± 1,0
Neraca Pembayaran Indonesia	Juta Dolar AS	12.506	12.495
Transaksi Berjalan	Juta Dolar AS	10.582	4.996
Transaksi Modal dan Finansial	Juta Dolar AS	3.673	7.500
Posisi Cadangan Devisa	Juta Dolar AS	66.105	78.464

Sumber: BPS
* Prakiraan Bank Indonesia
**Akhir Periode

stabilnya proses pemulihan ekonomi global, namun indikasi mulai bergulirnya proses pemulihan global yang lebih cepat dari prakiraan semula telah semakin meningkatkan optimisme terhadap kinerja perekonomian Indonesia ke depan. Optimisme ini juga didukung oleh karakter perekonomian domestik yang terbukti memiliki daya tahan yang cukup baik dalam menahan dampak krisis global. Meningkatnya optimisme terhadap prospek perekonomian Indonesia ke depan tercermin antara lain dari perbaikan peringkat rating Indonesia oleh lembaga pemeringkat internasional di awal tahun 2010.¹²³

Pada tahun 2010 pertumbuhan ekonomi diprakirakan mencapai 5,5%-6,0% (yoy). Dari sisi permintaan, meningkatnya pertumbuhan ekonomi diprakirakan bersumber dari membaiknya kinerja ekspor serta peningkatan kegiatan investasi. Hal ini sejalan dengan kinerja sisi sektoral yang ditandai oleh prakiraan meningkatnya kinerja sektor-sektor utama PDB. Perbaikan kinerja yang cukup penting diprakirakan mulai terjadi di sektor industri pengolahan, yang kinerjanya selama lima tahun terakhir berada dalam tren penurunan dan sempat makin terpuruk sejak kuartal IV 2008 akibat imbas krisis global. Indikasi penting yang mendukung tren perbaikan di sektor ini adalah kenaikan utilisasi kapasitas, kenaikan impor bahan baku serta konsumsi listrik oleh kalangan

123 Lembaga pemeringkat internasional Fitch Ratings pada tanggal 25 Januari 2010 menaikkan *sovereign rating* Indonesia menjadi BB+ dari semula BB dengan *stable outlook*. Selain itu, lembaga pemeringkat internasional Standard and Poor's (S&P) pada Maret 2010 juga menaikkan *long-term foreign currency rating* Indonesia menjadi BB dari semula BB- dengan *outlook* positif

bisnis dan industri. Meskipun demikian, tantangan ke depan yang dihadapi sektor industri pengolahan masih cukup besar, terutama yang terkait dengan berbagai permasalahan struktural yang sejauh ini belum mampu tertangani secara optimal, seperti permasalahan yang terkait infrastruktur, struktur pasar yang kurang mendukung persaingan usaha, dan lain sebagainya. Tantangan yang dihadapi sektor industri pengolahan pada tahun 2010 juga semakin besar terkait dengan diberlakukannya ASEAN-China *Free Trade Agreement* (AC-FTA) awal tahun 2010.

Sementara itu, mulai bergulirnya proses pemulihan perekonomian global berdampak positif terhadap prakiraan neraca pembayaran Indonesia (NPI) pada tahun 2010. Neraca transaksi berjalan akan kembali mencatat surplus yang terutama didorong oleh peningkatan kinerja ekspor barang dan jasa. Di neraca transaksi modal dan finansial, proses *deleveraging* yang mereda serta faktor kebijakan moneter global yang diprakirakan masih cukup akomodatif diprakirakan mendorong arus dana masuk dalam bentuk portofolio, meski dalam skala yang lebih terbatas dibandingkan periode-periode sebelumnya. Dengan perkembangan tersebut, keseluruhan NPI pada tahun 2010 diprakirakan mencatat surplus 12,5 miliar dolar AS sehingga cadangan devisa pada akhir tahun 2010 diprakirakan sebesar 78,5 miliar dolar AS atau setara dengan 6,4 bulan impor dan pembayaran utang luar negeri Pemerintah. Sejalan dengan prakiraan positif di neraca pembayaran, nilai tukar rupiah pada tahun 2010 secara umum diprakirakan bergerak stabil dengan kecenderungan sedikit lebih menguat dibandingkan tahun 2009.

Tabel 6.3 Proyeksi Pertumbuhan Ekonomi Menurut Penggunaan

persen yoy, Tahun Dasar 2000

Komponen	2004	2005	2006	2007	2008	2009	2010*
Produk Domestik Bruto	5,0	5,7	5,5	6,3	6,0	4,5	5,5 - 6,0
Konsumsi Rumah Tangga	5,0	4,0	3,2	5,0	5,3	4,9	4,5 - 5,0
Konsumsi Pemerintah	4,0	6,6	9,6	3,9	10,4	15,7	5,9 - 6,9
Pembentukan Modal Tetap Domestik Bruto	14,7	10,9	2,6	9,3	11,9	3,3	8,8 - 9,3
Ekspor Barang dan Jasa	13,5	16,6	9,4	8,5	9,5	-9,7	10,2 - 11,0
Impor Barang dan Jasa	26,7	17,8	8,6	9,1	10,0	-15,0	12,5 - 13,5

Sumber: BPS
*Prakiraan Bank Indonesia

Stabilitas nilai tukar rupiah yang terjaga, serta tidak adanya kebijakan strategis dari Pemerintah akan menjadi faktor yang memengaruhi perkembangan harga dalam negeri. Hal-hal tersebut diperkirakan menyebabkan tekanan terhadap inflasi tetap terkendali dan berada pada kisaran sasaran inflasi 2010 sebesar 5%±1% (yoy), di tengah meningkatnya akselerasi kegiatan perekonomian. Selanjutnya, peningkatan kinerja makroekonomi diperkirakan tetap didukung oleh tetap terjaganya stabilitas sistem keuangan yang menjadi fondasi bagi ketahanan perekonomian secara keseluruhan. Tetap solidnya kondisi sistem keuangan juga akan meningkatkan fungsi intermediasi lembaga-lembaga keuangan sehingga mampu memobilisasi potensi dana di masyarakat secara efisien. Peningkatan fungsi intermediasi tercermin pada penyaluran kredit perbankan yang diperkirakan tumbuh sebesar 17-20% pada tahun 2010.

Prakiraan Pertumbuhan Ekonomi

Prakiraan Permintaan Agregat

Dari sisi permintaan, pertumbuhan ekonomi pada tahun 2010 (Tabel 6.3) terutama akan didukung oleh membaiknya ekspor dan kegiatan investasi yang lebih tinggi.

Pemulihan ekonomi global akan mendorong kinerja ekspor untuk mengalami akselerasi pada tahun 2010 dengan angka pertumbuhan mencapai 10,2%-11,0%. Akselerasi ekspor Indonesia juga didukung oleh karakteristik barang ekspor yang berbasis komoditas primer seperti kelapa sawit, hasil-hasil pertanian, serta barang-barang tambang seperti batubara dan tembaga. Dengan karakteristik tersebut, ekspor Indonesia diperkirakan dapat mengalami pemulihan yang cukup cepat terhadap perbaikan permintaan di negara-negara mitra dagang karena merupakan bahan baku yang berperan di bagian awal dari rangkaian proses produksi barang industri.

Sementara itu, optimisme perbaikan ekonomi diperkirakan dapat mendorong investasi untuk tumbuh sebesar 8,8%-9,3% pada tahun 2010. Indikasi membaiknya investasi terlihat dari beberapa indikator seperti meningkatnya impor bahan baku untuk berbagai sektor dan konsumsi listrik industri. Investasi nonbangunan seperti mesin-mesin dan alat angkutan diperkirakan mencatat pertumbuhan yang cukup tinggi pada tahun 2010. Salah satu faktor pendorongnya adalah biaya kredit yang semakin murah seiring dengan suku bunga yang menurun. Indikasi perbaikan kinerja investasi terkonfirmasi dengan telah terlihatnya tanda-tanda peningkatan kapasitas produksi terpakai sektor industri. Sementara itu, investasi bangunan pada tahun 2010 diperkirakan juga tumbuh meningkat seiring dengan berjalannya stimulus pemerintah untuk proyek-proyek infrastruktur dan maraknya pembangunan properti. Indikasi peningkatan investasi bangunan tercermin pada pertumbuhan konsumsi semen dan peningkatan harga saham untuk perusahaan-perusahaan yang bergerak di bidang infrastruktur.

Konsumsi rumah tangga diperkirakan tetap tumbuh kuat dan dapat mendukung kegiatan perekonomian domestik. Hal ini didukung oleh terjaganya tingkat keyakinan konsumen, sebagaimana tercermin pada Indeks Keyakinan Konsumen dari hasil perhitungan Survei Konsumen Bank Indonesia. Faktor lain yang mendukung tetap kuatnya konsumsi rumah tangga adalah meningkatnya pendapatan yang antara lain didorong oleh perbaikan kinerja ekspor. Konsumsi masyarakat terhadap barang-barang nonpangan, seperti barang-barang ritel maupun kendaraan bermotor diperkirakan cenderung menguat. Hal tersebut dapat dilihat pada perkembangan Indeks Penjualan Ritel hasil survei Bank Indonesia yang menunjukkan tren peningkatan penjualan makanan, pakaian, peralatan rumah tangga, dan lain-lain. Berdasarkan faktor-faktor pendukung di atas, maka

Tabel 6.4 Proyeksi Pertumbuhan Ekonomi Menurut Lapangan Usaha (Sektoral)

persen yoy, Tahun Dasar 2000

Komponen	2004	2005	2006	2007	2008	2009	2010*
Produk Domestik Bruto	5,0	5,7	5,5	6,3	6,0	4,5	5,5 - 6,0
Pertanian	2,8	2,7	3,4	3,5	4,8	4,1	4,1 - 4,4
Pertambangan & Penggalian	-4,5	3,2	1,7	1,9	0,7	4,4	4,2 - 4,4
Industri Pengolahan	6,4	4,6	4,6	4,7	3,7	2,1	4,1 - 4,4
Listrik, Gas & Air Bersih	5,3	6,3	5,8	10,3	10,9	13,8	13,6 - 14,2
Bangunan	7,5	7,5	8,3	8,5	7,5	7,1	8,1 - 8,5
Perdagangan, Hotel & Restoran	5,7	8,3	6,4	8,9	6,9	1,1	5,1 - 5,5
Pengangkutan & Komunikasi	13,4	12,8	14,2	14,0	16,6	15,5	12,6 - 14,3
Keuangan, Persewaan & Jasa	7,7	6,7	5,5	8,0	8,2	5,0	4,9 - 5,3
Jasa-jasa	5,4	5,2	6,2	6,4	6,2	6,4	4,9 - 5,2

Sumber: BPS
*Prakiraan Bank Indonesia

konsumsi rumah tangga pada tahun 2010 diperkirakan tumbuh sekitar 4,5%-5,0%.

Konsumsi pemerintah diperkirakan tumbuh melambat menjadi sekitar 5,9%-6,9% pada tahun 2010. Perlambatan tersebut antara lain dipengaruhi oleh kenaikan gaji pokok aparatur negara yang lebih rendah pada tahun 2010. Selain itu, konsumsi pemerintah daerah juga diperkirakan relatif terbatas seiring dengan pembagian dana perimbangan ke daerah yang tidak mengalami peningkatan secara signifikan.

Kebutuhan barang-barang impor diperkirakan meningkat sehingga impor berpotensi tumbuh 12,5%-13,5% pada tahun 2010. Peningkatan kegiatan impor barang dan jasa tersebut didorong oleh berbagai faktor, antara lain perbaikan yang terjadi di sisi ekspor, membaiknya daya beli masyarakat, serta kegiatan investasi yang meningkat.

Prakiraan Penawaran Agregat

Proses perbaikan kondisi ekonomi global akan membawa optimisme pada kegiatan ekonomi domestik. Perkembangan tersebut selanjutnya akan mendorong sektor-sektor perekonomian Indonesia kembali pada fase pertumbuhan ekonomi yang meningkat (Tabel 6.4).

Pada tahun 2010, kinerja sektor industri diperkirakan membaik seiring dengan membaiknya perekonomian domestik dan global. Sektor industri tahun 2010 diperkirakan tumbuh sebesar 4,1%-4,4%. Peningkatan performa sektor industri ini sangat didukung oleh berbagai terobosan kebijakan di sektor riil, antara lain rencana

Pemerintah untuk memberikan insentif bagi industri pemasok bahan baku industri pengolahan dalam negeri. Dengan adanya paket insentif tersebut diharapkan investor asing tertarik untuk menanamkan modalnya di Indonesia, terutama dalam mengembangkan industri hilir nasional. Selain itu, Pemerintah juga berencana untuk merevitalisasi beberapa sektor industri antara lain industri semen, pupuk, gula, dan CPO. Rencana revitalisasi ini dimaksudkan untuk mengantisipasi perkembangan permintaan atas produk industri-industri tersebut. Pada tahun 2010, sektor industri akan menghadapi tantangan dari diberlakukannya AC-FTA awal tahun 2010. Produk-produk dari negara-negara ASEAN dan China akan menjadi pesaing kuat di pasar domestik terutama industri besi-baja, petrokimia, benang dan kain, hortikultura, makanan dan minuman, alas kaki, elektronik, kabel, serat sintetis, serta mainan. Untuk mengantisipasi adanya dampak yang kurang menguntungkan pasca AC-FTA, secara umum Pemerintah akan tetap mengedepankan langkah-langkah guna meningkatkan daya saing industri domestik melalui berbagai kebijakan yang pada intinya ditujukan untuk mengatasi *bottleneck* (sumbatan) yang selama ini dihadapi sektor industri. Meskipun demikian, dalam jangka pendek terdapat wacana di Pemerintah untuk menggunakan kebijakan nontarif guna melindungi industri domestik. Kebijakan tersebut antara lain ketentuan penggunaan Standar Nasional Indonesia (SNI) bagi produk yang beredar di Indonesia, penggunaan label halal dan label berbahasa Indonesia, pengetatan pengawasan impor produk manufaktur di enam pelabuhan, harmonisasi tarif agar bea masuk impor barang jadi lebih besar dari bahan baku terutama bagi produk yang bahan bakunya

masih termasuk dalam *High Sensitive List* (HSL) seperti gula, beras, jagung, dan kedelai. Selain itu, Pemerintah juga tengah berupaya untuk mengajukan penundaan pemberlakuan bea masuk 0% kepada 228 pos tarif yang secara umum dipandang masih cukup sensitif.

Seiring dengan semakin menguatnya pemulihan kondisi ekonomi global dan domestik pada tahun 2010, sektor perdagangan, hotel dan restoran diperkirakan turut membaik dan tumbuh 5,1%-5,5%. Perbaikan kinerja sektor perdagangan, hotel dan restoran didukung terutama oleh perbaikan daya beli masyarakat yang tercermin dari konsumsi rumah tangga yang tetap kuat. Membaiknya daya beli masyarakat memberikan dorongan positif terhadap kinerja di sektor industri pengolahan, yang pada gilirannya berdampak terhadap peningkatan aktivitas perdagangan besar dan eceran. Selain itu, suku bunga kredit yang terus menurun merupakan insentif pembiayaan di sektor ini. Sementara itu, subsektor hotel dan restoran juga diperkirakan mengalami peningkatan seiring dengan perbaikan ekonomi global serta didukung oleh berbagai upaya perbaikan citra pariwisata dan promosi yang diselenggarakan oleh Pemerintah. Untuk tahun 2010 Pemerintah menargetkan jumlah turis asing mencapai 7 juta orang, naik dari 6,5 juta orang pada tahun 2009.

Sektor pertanian pada tahun 2010 diperkirakan tumbuh pada kisaran 4,1%-4,4%. Mundurnya musim tanam tahun 2010 yang merupakan dampak dari menguatnya intensitas El Nino, diperkirakan memengaruhi kinerja sektor pertanian terutama padi. Namun, ketahanan pangan diperkirakan dapat terjaga. Kelebihan produksi pangan di tahun 2009 akan dimanfaatkan untuk menutupi kebutuhan pangan di tahun 2010. Untuk mendukung perkembangan sektor pertanian, terutama dalam rangka menjaga ketahanan pangan dan swasembada pangan, Pemerintah akan mengeluarkan peraturan tentang reforma agraria. Peraturan Pemerintah tersebut direncanakan akan diterbitkan tahun 2010. Melalui reforma agraria, Pemerintah ingin meningkatkan lahan garapan petani menjadi minimum dua hektar per keluarga. Besarnya lahan yang tersedia untuk dibagikan adalah sebesar 7,13 juta hektar yang ditujukan untuk perluasan areal tanaman pangan.

Sektor pengangkutan dan komunikasi tahun 2010 diperkirakan tumbuh relatif tinggi sekitar 12,6%-14,3% seiring dengan kian membaiknya prospek ekonomi ke depan. Dalam rangka mengantisipasi meningkatnya

kegiatan perdagangan (ekspor dan impor), sebagai dampak membaiknya kondisi ekonomi, Pemerintah akan menerapkan layanan pelabuhan 24 jam untuk 13 pelabuhan kelas satu di Indonesia. Sebagai tahap awal program ini akan diterapkan di empat pelabuhan utama yaitu Tanjung Priok (Jakarta), Tanjung Perak (Surabaya), Belawan (Medan), dan Pelabuhan Makassar. Pelayanan 24 jam tersebut akan memperlancar arus keluar masuk barang dan mengurangi waktu tunggu kapal yang bersandar atau melakukan bongkar-muat barang di pelabuhan. Untuk pengangkutan udara, Pemerintah melakukan penataan kembali angkutan udara perintis dan menyempurnakan sistem kontrak dari satu tahun menjadi tiga tahun. Selain itu, Departemen Perhubungan juga akan meningkatkan subsidi layanan penerbangan perintis tahun 2010 yang akan melayani 118 rute di 15 provinsi. Di subsektor komunikasi, perkembangan yang akan tumbuh dengan pesat adalah penggunaan internet. Hal ini dengan mempertimbangkan potensi pasar internet yang masih cukup besar terkait dengan masih relatif kecilnya pengguna internet (diperkirakan baru sekitar 2,5 juta) dibandingkan dengan jumlah penduduk Indonesia.

Pada tahun 2010, sektor bangunan diperkirakan tumbuh lebih tinggi dibandingkan dengan tahun 2009, yaitu sekitar 8,1%-8,5%. Dukungan kuat dari Pemerintah di bidang infrastruktur mendorong kinerja sektor bangunan tumbuh lebih baik lagi. Terkait pengembangan infrastruktur, Pemerintah telah menyatakan komitmennya untuk mendukung pembangunan infrastruktur dalam rangka mempercepat pembangunan ekonomi. Proyek pembangunan infrastruktur masuk dalam prioritas program RPJMN periode tahun 2010-2014. Untuk itu Pemerintah berencana akan mengeluarkan paket stimulus ekonomi untuk pengembangan infrastruktur nasional. Program percepatan pembangunan infrastruktur kelistrikan, yaitu proyek 10.000 MW tahap II akan dimulai tahun 2010.

Kegiatan ekonomi yang semakin meningkat di tahun 2010 akan meningkatkan pula aktivitas di sektor keuangan, persewaan dan jasa perusahaan. Di bidang *real estate*, kegiatan persewaan perkantoran mulai menggeliat, khususnya untuk sewa ruang kantor ukuran kecil. Selain itu, dalam rangka merebut pasar maka kegiatan riset, promosi produk, dan penyelenggaraan pameran diperkirakan semakin mewarnai dunia bisnis. Dengan demikian industri-industri yang bergerak di bidang tersebut akan kian berkembang dan sumbangannya pada kinerja sektor keuangan, persewaan dan jasa perusahaan akan semakin besar. Berdasarkan gambaran ini, maka

pertumbuhan sektor keuangan, persewaan dan jasa perusahaan pada tahun 2010 diperkirakan mencapai 4,9%-5,3%.

Prakiraan Neraca Pembayaran Indonesia (NPI)

Prospek pemulihan ekonomi global berdampak positif terhadap prakiraan NPI tahun 2010. Meneruskan kinerjanya selama tahun 2009, NPI diperkirakan tetap mencatat surplus. Di pasar barang, kombinasi membaiknya permintaan eksternal dan kenaikan harga komoditas akan menopang kinerja nilai ekspor. Di sisi domestik, transmisi positifnya ekonomi global diperkirakan

berdampak terhadap pertumbuhan kegiatan investasi dan konsumsi sehingga mendorong nilai impor. Di sisi transaksi modal dan finansial, proses *deleveraging* yang mereda serta faktor kebijakan moneter global yang diperkirakan masih cukup akomodatif diperkirakan menopang arus dana masuk dalam bentuk portofolio, meski dalam skala yang lebih terbatas dibandingkan periode-periode sebelumnya. Dengan perkembangan tersebut, keseluruhan NPI pada tahun 2010 diperkirakan mencatat surplus 12,5 miliar dolar AS sehingga cadangan devisa pada akhir tahun 2010 diperkirakan sebesar 78,5 miliar dolar AS atau setara dengan 6,4 bulan impor dan pembayaran utang luar negeri Pemerintah (Tabel 6.5).

Tabel 6.5 Prakiraan Neraca Pembayaran Indonesia tahun 2010

Juta Dolar AS		
Rincian	2009	2010**
I. Transaksi Berjalan	10.582	4.996
A. Barang, bersih (Neraca Perdagangan)	35.197	33.574
– Ekspor, fob.	119.513	139.737
– Impor, fob.	-84.316	-106.163
1. Nonmigas	26.860	22.169
– Ekspor	99.063	113.734
– Impor	-72.203	-91.565
2. Migas	8.337	11.404
– Ekspor	20.451	26.003
– Impor	-12.113	-14.599
B. Jasa-jasa, bersih	-14.155	-16.101
C. Pendapatan, bersih	-15.331	-17.496
D. Transfer berjalan, bersih	4.871	5.018
II. Transaksi Modal dan Finansial	3.673	7.500
A. Transaksi Modal	96	161
B. Transaksi Finansial	3.577	7.339
1. Investasi Langsung	2.313	5.971
2. Investasi Portofolio	10.103	6.682
3. Investasi Lainnya	-8.838	-5.314
III. Jumlah (I+II)	14.255	12.495
IV. Selisih Perhitungan Bersih	-1.749	0
V. Neraca Keseluruhan (III+IV)	12.506	12.495
VI. Cadangan devisa dan yang terkait*)	-12.506	-12.495
A. Perubahan Cadangan Devisa	-12.506	-12.495
B. Pinjaman IMF	0	0
Catatan:		
Posisi Cadangan Devisa	66.105	78.464
(Setara dengan bulan impor dan pembayaran utang luar negeri pemerintah)	6,5	6,4

* Tanda - (minus) menunjukkan surplus dan sebaliknya untuk tanda + (plus) menunjukkan defisit
**Prakiraan Bank Indonesia

Neraca Transaksi Berjalan

Neraca transaksi berjalan tahun 2010 diperkirakan mencatat surplus sebesar 5,0 miliar dolar AS atau sekitar 0,8% terhadap PDB. Hal tersebut terutama disebabkan oleh kinerja ekspor yang diperkirakan semakin menguat sejalan dengan semakin positifnya permintaan eksternal dan kenaikan harga komoditas dunia. Kinerja ekspor barang diperkirakan mencapai 140 miliar dolar AS pada tahun 2010. Dilihat dari jenis komoditasnya, selain komoditas berbasis sumber daya alam, ekspor komoditas manufaktur juga diperkirakan mengalami peningkatan seiring dengan pulihnya kondisi perekonomian negara-negara maju. Sementara itu, positifnya pertumbuhan ekonomi global juga akan ditransmisikan ke ekonomi domestik dengan semakin meningkatnya daya serap perekonomian. Meningkatnya aktivitas perekonomian akan mendorong penggunaan bahan baku, barang modal dan konsumsi termasuk juga barang-barang yang tidak dapat dipenuhi dari dalam negeri. Dengan perkembangan tersebut, impor barang diperkirakan mencapai 106 miliar dolar AS pada tahun 2010.

Sementara itu, transaksi jasa, pendapatan, dan transfer berjalan pada tahun 2010 diperkirakan mencatat defisit sebesar 29 miliar dolar AS. Naiknya harga minyak serta aktivitas perdagangan berpengaruh terhadap kenaikan defisit pada neraca jasa, terutama jasa transportasi. Naiknya harga minyak juga meningkatkan defisit neraca pendapatan sejalan dengan meningkatnya bagi hasil perusahaan PMA sektor migas. Meningkatnya beban pembayaran bunga utang luar negeri pemerintah diperkirakan juga akan menambah defisit neraca pendapatan tersebut. Adapun surplus transfer berjalan diperkirakan sedikit meningkat dari periode sebelumnya. Di tengah kondisi ekonomi global yang menguat, penerimaan devisa baik yang bersumber dari turis asing maupun remitansi TKI mampu menjadikan alternatif pemasok devisa yang potensial.

Neraca Transaksi Modal dan Finansial

Kinerja neraca transaksi modal dan finansial tahun 2010 diperkirakan mencatat surplus sekitar 7,5 miliar dolar AS. Membaiknya perekonomian domestik serta kebijakan moneter global yang masih cukup akomodatif menjadi penopang neraca transaksi modal dan finansial. Optimisme terhadap perekonomian, yang juga didukung dengan perbaikan harga komoditas mampu menopang arus masuk dalam bentuk investasi langsung, baik di sektor migas maupun di sektor nonmigas.

Sementara pada komponen investasi portofolio, surplus diperkirakan tetap terjaga. Arus modal investasi portofolio terjadi seiring dengan kebijakan moneter global yang masih cukup akomodatif serta optimisme perekonomian yang terus tumbuh. Selain itu, rencana Pemerintah menerbitkan obligasi internasional untuk kebutuhan pembiayaan perekonomian pada tahun 2010 diperkirakan mampu menjadi salah satu faktor positif lainnya bagi pencapaian kinerja transaksi portofolio.

Komponen terakhir pada neraca transaksi modal dan finansial, yaitu investasi lainnya, diperkirakan tetap mencatat defisit meski lebih rendah dari defisit pada tahun 2009. Sejalan dengan kenaikan belanja dan investasi Pemerintah tahun 2010, pembiayaan domestik maupun pembiayaan yang berasal dari ULN berupa penarikan pinjaman program dan proyek diperkirakan lebih besar dari pinjaman pada tahun 2009. Begitu juga di sektor swasta, sejalan dengan meningkatnya kebutuhan pembiayaan domestik, penarikan pinjaman dalam bentuk non-FDI diperkirakan lebih tinggi dari tahun 2009. Potensi ekonomi yang lebih baik serta berlanjutnya kenaikan harga komoditas dapat mendorong aliran dana swasta yang lebih besar.

Prakiraan Nilai Tukar Rupiah

Secara umum nilai tukar rupiah selama tahun 2010 diperkirakan bergerak stabil pada kisaran level yang sedikit lebih kuat dibandingkan pergerakan di tahun 2009. Pergerakan rupiah yang relatif menguat ditopang oleh kondisi fundamental perekonomian yang cukup solid di tengah kondisi eksternal yang semakin kondusif. Stabilitas pergerakan rupiah selama tahun 2010 didukung oleh keseimbangan permintaan dan penawaran di pasar valas sejalan dengan semakin membaiknya *risk appetite* investor global terhadap aset keuangan domestik dan peningkatan ekspor nonmigas.

Namun demikian, terdapat potensi tekanan terhadap nilai tukar rupiah pada tahun 2010 baik dari eksternal maupun domestik. Dari eksternal, semakin membaiknya kondisi perekonomian global dan naiknya harga komoditas akan meningkatkan potensi risiko tekanan inflasi pada tahun 2010 yang pada gilirannya dapat memengaruhi perkembangan nilai tukar rupiah. Dari sisi domestik, perkembangan ekonomi yang membaik akan mendorong peningkatan kebutuhan impor sehingga menyebabkan permintaan nilai tukar dolar AS meningkat. Dalam kaitan ini, Bank Indonesia akan memantau berbagai faktor

risiko yang dapat memberikan tekanan terhadap nilai tukar rupiah dan senantiasa menjaga volatilitas nilai tukar rupiah dengan menyeimbangkan permintaan dan penawaran di pasar valas. Selain itu, Bank Indonesia juga akan meningkatkan efektivitas peraturan kehati-hatian dan pemantauan lalu-lintas devisa.

Prakiraan Inflasi

Pada tahun 2010, inflasi IHK diperkirakan tetap terkendali dan berada pada kisaran sasaran sebesar 5%±1%. Dari sisi eksternal, inflasi terutama disumbang oleh peningkatan inflasi mitra dagang sejalan dengan prakiraan membaiknya ekonomi global dan meningkatnya harga-harga komoditas internasional terutama harga minyak dunia. Dari sisi domestik, tekanan inflasi pada tahun 2010 berasal dari membaiknya pertumbuhan ekonomi tahun 2010. Hal tersebut diindikasikan oleh total utilisasi kapasitas yang terlihat sedikit meningkat. Sementara itu, ekspektasi inflasi tahun 2010 masih cenderung menurun. Membaiknya ekspektasi inflasi ini terkait dengan rendahnya realisasi inflasi di tahun 2009, stabilitas nilai tukar rupiah yang terjaga, dan tidak adanya kebijakan strategis dari pemerintah.

Dari sisi nonfundamental, kenaikan tekanan inflasi diperkirakan bersumber dari kenaikan beberapa *administered prices* yang bersifat nonstrategis. Kenaikan inflasi *administered* diperkirakan terkait dengan rencana kebijakan pemerintah baru untuk menyesuaikan harga-harga barang/jasa nonstrategis. Sementara itu, inflasi *volatile food* diperkirakan meningkat dibandingkan dengan tahun 2009, namun masih berada di bawah rata-rata historisnya. Ancaman El Nino yang dikhawatirkan akan memberikan dampak meningkatnya harga komoditas pangan internasional diperkirakan berdampak minimal terhadap harga bahan pangan domestik. Prakiraan tersebut dikonfirmasi oleh selisih beberapa harga bahan makanan domestik dengan harga komoditas internasional yang terbilang masih cukup besar. Hal itu menunjukkan bahwa harga beberapa komoditas domestik tidak terlalu elastis terhadap perubahan harga internasional. Relatif rendahnya inflasi *volatile food* juga didukung oleh terjaganya pasokan serta distribusi bahan makanan, terutama bahan makanan pokok.

Prakiraan Perbankan

Secara umum, prospek perbankan Indonesia ke depan adalah cukup positif. Hal tersebut didukung oleh prakiraan pertumbuhan ekonomi Indonesia ke depan yang relatif

lebih tinggi dibandingkan negara-negara lainnya. Dari sisi permodalan, perbankan sebagai industri yang mendominasi sektor keuangan Indonesia diperkirakan memiliki ketahanan yang relatif memadai.

Dari sisi pembiayaan, dengan komitmen perbankan untuk terus melakukan penyesuaian suku bunga deposito dan kredit disertai dengan prospek perekonomian yang membaik, penyaluran kredit perbankan diperkirakan terus meningkat. Dengan perkembangan tersebut, pada tahun 2010 kredit perbankan diperkirakan kembali terakselerasi sebesar 17-20%. Bank Indonesia akan terus memantau dan mengupayakan agar efisiensi perbankan terus dapat ditingkatkan sehingga fungsi intermediasi perbankan dapat terus ditingkatkan.

Dari sisi risiko, ketahanan perbankan Indonesia pada tahun 2010 diperkirakan tetap memadai dalam menyerap berbagai potensi risiko. Hal tersebut didukung oleh produk perbankan domestik yang relatif masih tradisional sehingga diharapkan tidak memiliki permasalahan seberat perbankan di luar negeri. Namun demikian, faktor eksternal tetap dapat berpengaruh secara tidak langsung terhadap sistem perbankan apabila tidak diantisipasi dan tidak diambil tindakan pencegahan.

Prospek perbankan yang positif juga didukung oleh pelaksanaan beberapa agenda ke depan seperti implementasi risiko operasional dalam kerangka Basel II serta rencana penerapan PSAK No. 50 dan 55 yang dinilai berpotensi semakin meningkatkan kepercayaan pasar. Terkait dengan implementasi Basel II, salah satu isu pokok adalah dampak penerapan *capital charges* untuk risiko operasional terhadap permodalan bank. Adapun PSAK No.50 dan 55 antara lain terkait dengan pelaksanaan *marking to market* terhadap seluruh aktiva dan pasiva perusahaan keuangan, termasuk perbankan. Secara umum, penerapan agenda-agenda tersebut diyakini akan semakin meningkatkan kepercayaan pasar terhadap Indonesia ke depan. Agar penerapan Basel II dan kedua standar akuntansi tersebut dapat berjalan dengan baik dan lancar, komunikasi yang efektif dengan para *stakeholders* dan pihak-pihak terkait lainnya perlu dilakukan untuk memperoleh kesamaan pandangan tentang manfaatnya bagi stabilitas sistem keuangan secara keseluruhan.

Prakiraan Pasar Keuangan Nonperbankan

Sejalan dengan pemulihan ekonomi global yang tengah berlangsung dan relatif terjaganya indikator makro

maupun mikro domestik, kinerja pasar keuangan nonperbankan pada tahun 2010 diperkirakan terus membaik. Bersamaan dengan itu, pertumbuhan dan inovasi produk keuangan juga akan semakin mewarnai perkembangan pasar keuangan nonperbankan ke depan.

Dari pasar modal, Indeks Harga Saham Gabungan (IHSG) berpotensi untuk mencapai level tertingginya pada tahun 2010. Pondasi yang melandasi pertumbuhan IHSG ke depan adalah prospek laporan keuangan yang diperkirakan terus membaik, cukup besarnya rencana belanja modal serta minat asing yang tinggi seiring dengan perkembangan ekonomi yang semakin kondusif. Dengan semakin besarnya komposisi sektor berbasis komoditas di pasar saham, kenaikan harga komoditas dunia diperkirakan berpengaruh positif terhadap bursa saham. Dengan perkembangan tersebut, aktivitas perdagangan saham secara keseluruhan diperkirakan juga akan meningkat.

Sementara itu, pasar SUN diperkirakan terus melanjutkan kinerja positifnya pada tahun 2010. Tingginya minat asing di pasar obligasi negara, stabilitas nilai tukar serta terjaganya faktor risiko fiskal merupakan faktor-faktor pendorong bagi penguatan kinerja SUN tersebut.

Searah dengan membaiknya prospek pasar saham maupun SUN dan kecenderungan penurunan suku bunga deposito, kinerja reksadana pada tahun 2010 diperkirakan kembali meningkat. Selain itu, berbagai produk yang ditawarkan diperkirakan semakin baik dalam melakukan mitigasi risiko khususnya yang berkaitan dengan faktor likuiditas.

■ **Prospek Ekonomi Jangka Menengah**

Dalam perspektif yang lebih panjang, prakiraan perekonomian akan semakin baik seiring dengan peningkatan akumulasi kapital serta perbaikan tingkat produktivitas maupun efisiensi.

Peningkatan akumulasi kapital, selain akan meningkatkan kapasitas perekonomian domestik, pada dasarnya juga merupakan sumber penciptaan pendapatan di masyarakat. Namun demikian, upaya peningkatan akumulasi kapital perlu didukung oleh kecukupan tabungan domestik masyarakat. Dukungan dari tabungan domestik ini menjadi faktor penting mengingat masih

relatif terbatasnya sumber pendanaan yang berasal dari penanaman modal asing. Terkait hal ini, komposisi penduduk Indonesia ke depan yang masih didominasi oleh mereka yang berada dalam tahapan usia produktif (yang berarti menurunnya rasio ketergantungan) merupakan suatu keuntungan tersendiri, karena menjadi potensi yang mendukung peningkatan tabungan di masyarakat.¹²⁴

Selain itu, berbagai perbaikan di sektor riil yang secara konsisten dijalankan oleh Pemerintah juga memberikan kontribusi signifikan dalam perbaikan iklim investasi. Keberhasilan dalam menciptakan iklim investasi yang lebih kondusif juga akan memberi dampak positif lain, yaitu membaiknya aliran masuk FDI global yang pada gilirannya diperkirakan turut membawa inovasi maupun teknologi baru. Dengan faktor-faktor ini dan didukung oleh ketersediaan pembiayaan yang utamanya bersumber dari tabungan domestik, maka kegiatan investasi diperkirakan menjadi mesin utama pertumbuhan ekonomi ke depan. Performa kegiatan investasi mulai tumbuh pesat pada tahun 2010 dan selanjutnya akan mengalami akselerasi dan mencapai kisaran 11,9% – 12,9% pada tahun 2014.

Meskipun demikian, pertumbuhan yang hanya mengandalkan pada akumulasi kapital akan terkendala untuk berkesinambungan dalam jangka panjang, mengingat adanya fenomena menurunnya margin manfaat (*diminishing returns*) dari kapital. Oleh karena itu peran produktivitas perekonomian (*total factor productivity*) menjadi sangat penting dalam pertumbuhan ekonomi ke depan sehingga perlu terus diupayakan peningkatannya.¹²⁵ Perbaikan tingkat produktivitas

124 Dalam konteks demografi, usia ketergantungan adalah bagi penduduk yang berusia kurang dari 15 tahun dan yang berusia lebih dari 60 atau 65 tahun (definisi usia disesuaikan dengan struktur demografi di suatu negara). Penduduk yang berusia di antara 15 tahun s/d 60 atau 65 tahun adalah mereka yang berada dalam usia produktif. Rasio ketergantungan (*dependency ratio*) dengan demikian adalah rasio antara penduduk berusia < 15 tahun dan berusia lanjut (> 60 atau 65 tahun) dengan penduduk usia produktif. Beberapa kajian, diantaranya Goeltom, Miranda S. & Solikin M. Juhro (2006) sertaADIOETOMO, Sri M. (2004) memprakirakan bahwa satu dekade ke depan merupakan suatu “*window opportunity*” dimana Indonesia akan menikmati bonus demografi, yaitu periode pada saat rasio ketergantungan berada pada tingkat minimal.

125 Secara konseptual, aspek *Total Factor Productivity* (TFP) sebagai salah satu komponen sumber-sumber pertumbuhan ekonomi dikenal dalam Teori Pertumbuhan (*Growth Theory*). Secara empiris, peran TFP dalam peningkatan pertumbuhan ekonomi telah banyak dibuktikan. Salah satunya dilaporkan dalam *World Development Report* (2005) dimana berdasarkan studi terhadap berbagai negara pada periode 1960-2000, diketemukan bahwa faktor dominan (45-90%) penyebab perbedaan pertumbuhan antara negara adalah faktor perbedaanTFP.

Tabel 6.6 Proyeksi Pertumbuhan Ekonomi Jangka Menengah (tahun 2010-2014)

persen yoy, Tahun Dasar 2000

Komponen	2008	2009	2010*	2011*	2012*	2013*	2014*
Produk Domestik Bruto	6,0	4,5	5,5 - 6,0	6,0 - 6,5	6,0 - 7,0	6,1 - 7,1	6,5 - 7,5
Konsumsi Rumah Tangga	5,3	4,9	4,5 - 5,0	4,8 - 5,3	4,6 - 5,6	5,0 - 6,0	5,6 - 6,6
Konsumsi Pemerintah	10,4	15,7	5,9 - 6,9	8,8 - 9,8	8,5 - 9,5	8,6 - 9,6	8,6 - 9,6
Pembentukan Modal Tetap Domestik Bruto	11,9	3,3	8,8 - 9,3	10,8 - 11,3	10,6 - 11,6	10,9 - 11,9	11,9 - 12,9
Ekspor Barang dan Jasa	9,5	-9,7	10,2 - 11,0	11,0 - 12,0	11,1 - 12,1	11,8 - 12,8	12,8 - 13,8
Impor Barang dan Jasa	10,0	-15,0	12,5 - 13,5	14,8 - 15,8	14,7 - 15,7	15,1 - 16,1	15,9 - 16,9
Inflasi (% , akhir periode)	11,06	2,78	5,0 ± 1	5,0 ± 1	4,5 ± 1	4,5 ± 1	4,0 ± 1

Sumber: BPS
*Prakiraan Bank Indonesia

maupun efisiensi dapat tercipta melalui proses alih teknologi maupun peningkatan kualitas manajerial yang turut dibawa oleh aliran masuk penanaman modal asing. Selain itu, peningkatan produktivitas maupun efisiensi juga perlu diupayakan melalui berbagai kebijakan yang dapat meningkatkan kualitas *human capital*. Dalam hal ini, peran aktif Pemerintah diharapkan terus meningkat khususnya dalam aspek-aspek yang paling mendasar yaitu peningkatan akses terhadap pendidikan maupun fasilitas kesehatan. Untuk Indonesia, peningkatan TFP bukan merupakan suatu hal yang mustahil untuk dicapai mengingat adanya komitmen dari Pemerintah untuk memberikan dorongan ekstra terhadap peningkatan kualitas manusia melalui berbagai program kesejahteraan, baik di perkotaan maupun daerah pelosok, sebagaimana yang tertuang dalam RPJMN tahun 2010-2014.

Meningkatnya kegiatan investasi, yang dibarengi dengan meningkatnya produktivitas perekonomian, pada gilirannya akan meningkatkan kapasitas perekonomian, yang juga berarti semakin baiknya kemampuan suplai domestik. Perbaikan di sisi suplai ini diharapkan mampu mengimbangi kuatnya permintaan domestik yang dimotori oleh konsumsi rumah tangga sehingga ke depan tekanan inflasi dapat dikendalikan. Sementara itu, akselerasi kegiatan investasi akan berkontribusi pada meningkatnya tingkat penyerapan tenaga kerja sehingga tingkat pengangguran secara gradual juga akan dapat ditekan.

Di sisi eksternal, perbaikan kinerja ekspor diperkirakan semakin positif seiring dengan perbaikan di perekonomian global dan membaiknya daya saing produk domestik. Berdasarkan gambaran ini, pertumbuhan ekspor Indonesia diperkirakan mencapai kisaran 12,8% – 13,8% pada tahun

2014 (Tabel 6.6). Penguatan kinerja sektor eksternal ini merupakan salah satu faktor yang akan turut menopang stabilitas nilai tukar rupiah sehingga nilai tukar rupiah diperkirakan tetap terjaga kestabilannya.

Dengan pasar domestik yang besar yang didukung oleh kemampuan dalam meningkatkan *income generating capacity* yang berkesinambungan yang ditopang oleh pesatnya kegiatan akumulasi kapital di masyarakat, serta didukung oleh terjaganya stabilitas sistem keuangan, maka perkembangan konsumsi masyarakat dalam jangka panjang diperkirakan tetap kuat. Dengan gambaran di atas, maka dalam jangka menengah pertumbuhan konsumsi masyarakat diperkirakan berada dalam kisaran 5,6% – 6,6% pada tahun 2014.

Dinamika permintaan domestik yang tetap kuat, yang mampu diimbangi oleh kapasitas perekonomian dengan dukungan akumulasi kapital serta peningkatan produktivitas dan efisiensi perekonomian, pada akhirnya menyebabkan pertumbuhan ekonomi dapat tetap berlangsung tanpa perlu dibarengi dengan timbulnya instabilitas harga domestik.

Dengan kondisi tersebut di atas, secara garis besar, perekonomian domestik dalam jangka menengah akan ditandai dengan semakin tingginya tingkat pertumbuhan yang dibarengi dengan tingkat inflasi yang rendah dan stabil. Pada tahun 2014, perekonomian Indonesia diperkirakan dapat tumbuh pada kisaran 6,5% – 7,5%. Sementara itu, tekanan inflasi dalam jangka menengah diperkirakan menurun hingga berada dalam kisaran 4% ± 1% pada tahun 2014.

Perkembangan perekonomian Indonesia ke depan akan dihadapkan pada dinamika lingkungan strategis yang sangat menantang, baik di tataran global maupun domestik. Dengan mencermati tantangan-tantangan dalam perekonomian yang berpotensi menghambat upaya perbaikan ekonomi ke depan, maka perlu dirumuskan suatu agenda kebijakan ekonomi nasional yang terintegrasi dengan tujuan memperkuat ketahanan ekonomi domestik dan mendorong momentum pemulihan ekonomi lebih lanjut. Dari perspektif kebijakan pemerintah, agenda kebijakan ekonomi akan dilaksanakan secara menyeluruh di berbagai sektor ekonomi sejalan dengan upaya untuk memperkuat daya saing perekonomian. Agenda strategis tersebut telah dituangkan dalam RPJM tahun 2009-2014. Sementara itu, kebijakan yang akan ditempuh oleh Bank Indonesia akan diarahkan untuk menjaga stabilitas makroekonomi dan stabilitas sistem keuangan, serta mendorong fungsi intermediasi perbankan guna mendukung upaya peningkatan pertumbuhan ekonomi secara berkesinambungan. Koordinasi Pemerintah dan Bank Indonesia akan terus ditingkatkan antara lain dengan mengoptimalkan berbagai forum yang ada baik di pusat maupun di daerah seperti optimalisasi TPI/TPID.

Arah Kebijakan Bank Indonesia ke Depan

Memasuki fase pemulihan ekonomi paska krisis ekonomi global, kebijakan yang akan ditempuh oleh Bank Indonesia tetap diarahkan untuk menjaga stabilitas makroekonomi dan mendorong fungsi intermediasi perbankan guna

mendukung upaya peningkatan pertumbuhan ekonomi yang berkesinambungan. Belajar dari pengalaman dalam dua tahun terakhir, yang diwarnai oleh perubahan perilaku di sektor keuangan serta krisis ekonomi global, dapat ditarik substansi pemikiran bahwa pencapaian stabilitas makroekonomi tidak hanya terkait dengan stabilitas harga, namun juga berinteraksi dengan stabilitas sistem keuangan. Dalam konteks ini, kebijakan moneter akan diarahkan untuk menjaga inflasi yang rendah dan stabil, dengan tetap memerhatikan kestabilan sistem keuangan. Sebaliknya, kebijakan perbankan tidak hanya fokus kepada upaya menopang industri perbankan, tetapi juga mendukung stabilitas makroekonomi dan menopang aktivitas perekonomian. Dalam perspektif yang lebih luas, koordinasi dengan kebijakan fiskal dan kebijakan sektor riil akan terus ditingkatkan guna menciptakan fondasi yang kokoh bagi pencapaian pertumbuhan ekonomi yang berkesinambungan ke depan.

Kebijakan Moneter

Kebijakan moneter Bank Indonesia tahun 2010 diarahkan untuk mencapai sasaran inflasi yang ditetapkan 5% ± 1% dengan tetap memperhatikan stabilitas sistem keuangan dan memfasilitasi momentum pertumbuhan ekonomi. Dalam jangka menengah, Bank Indonesia akan mengarahkan agar inflasi terus dalam tren yang menurun sehingga berada pada tingkat yang rendah dan sebanding dengan tingkat inflasi negara di kawasan regional yang sudah berada pada kisaran 3%. Upaya untuk mencapai tingkat inflasi yang rendah dalam jangka menengah sangat relevan untuk menjaga daya saing perekonomian domestik, terutama dalam menghadapi Masyarakat Ekonomi ASEAN (MEA) pada tahun 2015. Dalam konteks tersebut, BI Rate akan ditetapkan berdasarkan asesmen terhadap upaya pencapaian sasaran inflasi tersebut, namun tetap kondusif bagi perbaikan fungsi intermediasi perbankan dan pemulihan perekonomian domestik. Dalam jangka menengah panjang, level BI Rate yang diperlukan untuk mengarahkan inflasi sebanding dengan inflasi di kawasan regional diperkirakan akan semakin rendah jika berbagai upaya untuk memperbaiki kemampuan sisi penawaran dalam merespons meningkatnya permintaan berjalan dengan baik.

Dalam tataran operasional kebijakan, Bank Indonesia akan terus melanjutkan kebijakan pengelolaan likuiditas di pasar uang. Di pasar uang rupiah, kebijakan tersebut antara lain memfasilitasi penyempurnaan infrastruktur pasar *repo*, mendorong perbankan untuk menempatkan

dananya pada instrumen moneter yang berjangka lebih panjang, dan memperluas basis pelaku pasar uang. Berbagai upaya tersebut akan dilakukan secara bertahap dengan mempertimbangkan kondisi pasar uang yang mengalami eksekutivitas. Di pasar valas, kebijakan Bank Indonesia pada dasarnya diarahkan untuk meminimalkan volatilitas nilai tukar rupiah. Dengan strategi ini, penyesuaian nilai tukar rupiah yang konsisten dengan perkembangan fundamentalnya dapat berjalan secara gradual sehingga tidak menimbulkan gejolak yang berlebihan. Disamping itu, Bank Indonesia akan memfasilitasi berbagai upaya Pemerintah guna meningkatkan pengelolaan devisa hasil ekspor migas dan nonmigas.

Kebijakan Perbankan

Belajar dari pengalaman dalam menghadapi krisis ekonomi global dua tahun terakhir, kebijakan perbankan tahun 2010 akan ditempuh melalui empat kebijakan utama berbasis insentif dan disinsentif guna memperkuat ketahanan dan meningkatkan peran fungsi intermediasi perbankan.

Pertama, peningkatan ketahanan sistem perbankan. Kebijakan ini akan ditempuh melalui beberapa langkah yaitu penguatan pengaturan, pemantapan sistem pengawasan bank, penataan kembali tingkat kompetisi di industri perbankan Indonesia, serta pendalaman pasar keuangan. Langkah penguatan pengaturan dilakukan melalui penyesuaian peraturan permodalan untuk tujuan memperkuat ketahanan bank terhadap risiko, peraturan transparansi laporan keuangan, peningkatan kualitas implementasi tata kelola organisasi yang baik, serta peningkatan efektivitas manajemen risiko. Kebijakan pemantapan sistem pengawasan bank akan dicapai di antaranya dengan penyempurnaan dan penguatan metode dan praktek pengawasan berbasis risiko, penguatan ketentuan operasional pengawasan bank, penyempurnaan ketentuan uji kelayakan dan kepatutan, dan peningkatan kerjasama dengan otoritas pengawas lembaga keuangan nonbank baik di dalam maupun di luar negeri. Kebijakan penataan kembali tingkat kompetisi di industri perbankan Indonesia akan dilakukan dengan memantapkan kembali struktur perbankan yang menyelaraskan skala usaha dengan kebutuhan permodalan, guna mempertinggi kemampuan menyerap risiko usaha. Selain itu Bank Indonesia akan memperbaiki ketentuan yang mencakup antara lain mengenai merger, konsolidasi, sumber dana akuisisi bank, persyaratan badan yang dapat mengakuisisi bank, peran pemilik perorangan/

keluarga, serta persyaratan pengembangan usaha. Kebijakan pendalaman pasar keuangan diarahkan untuk mendorong pengembangan produk-produk keuangan yang sekaligus dapat digunakan bank sebagai alternatif penyaluran dan penempatan dana secara produktif bagi sektor riil khususnya pembiayaan infrastruktur. Dengan demikian pasar uang diharapkan menjadi lebih likuid dan bank tidak terlalu bergantung terhadap pendapatan dari penempatan pada instrumen Bank Indonesia.

Kedua, peningkatan intermediasi perbankan melalui penyempurnaan peraturan dan penyediaan infrastruktur pendukung. Peraturan yang akan disempurnakan di antaranya meliputi giro wajib minimum (GWM), optimalisasi dan efisiensi kegiatan operasional bank, kemudahan persyaratan kegiatan devisa yang dapat mendorong pemberian kredit. Bank Indonesia juga akan mendorong terbentuknya institusi yang memiliki fungsi menyediakan basis data kredit per sektor dan per daerah, guna memudahkan bank dalam mengukur risiko.

Ketiga, peningkatan peran perbankan syariah dalam perekonomian nasional dan penguatan ketahanannya. Kebijakan untuk perbankan syariah akan ditempuh di antaranya dengan meningkatkan insentif untuk mendorong peningkatan modal, memfasilitasi pengembangan unit usaha syariah dan anak perusahaannya, serta memfasilitasi terpenuhinya kebutuhan SDM perbankan syariah yang kompeten.

Keempat, peningkatan peran Bank Perkreditan Rakyat (BPR) dalam pembiayaan keuangan mikro dan penguatan ketahanannya. Kebijakan tersebut akan ditempuh di antaranya dengan, memberikan insentif untuk mendorong peningkatan modal, dan memfasilitasi terpenuhinya kebutuhan SDM BPR yang kompeten, serta mempertegas posisi BPR sebagai *community bank*.

Dalam upaya untuk memperkuat peran perbankan sebagai lembaga intermediasi, Bank Indonesia akan mengarahkan perbankan untuk meningkatkan efisiensi industri perbankan. Dalam hubungan tersebut, langkah yang akan dilakukan adalah memberikan acuan (*benchmark*) biaya dana, biaya *overhead*, premi risiko, dan margin keuntungan. Dengan demikian bank dapat mengidentifikasi sumber inefisiensi dan mencari cara untuk meningkatkan efisiensi agar penetapan suku bunga kredit menjadi lebih wajar. Efisiensi industri perbankan juga akan ditingkatkan dengan melakukan pendalaman pasar keuangan. Langkah yang ditempuh misalnya

bekerjasama dengan sejumlah instansi lain untuk mengkaji dan mendorong instrumen pasar uang jangka pendek yang dapat menjadi kompetitor dari kredit jangka pendek perbankan.

Untuk memperkuat ketahanan sistem keuangan secara keseluruhan, Bank Indonesia ingin berperan sebagai regulator sistemik yang mengawasi kesehatan dan stabilitas keseluruhan sistem keuangan. Kebutuhan regulator sistemik semakin mengemuka setelah belajar dari pengalaman krisis ekonomi global dua tahun terakhir ini. Peran institusi mencakup pengumpulan, analisis dan pelaporan informasi terkait interaksi signifikan di pasar dan risiko yang ada di antara lembaga keuangan; meneliti kemungkinan adanya lembaga keuangan yang menyebabkan sistem keuangan kurang terproteksi dari risiko sistemik; merancang dan mengimplementasikan aturan; serta melakukan koordinasi dengan lembaga regulator lainnya, termasuk otoritas fiskal, dalam mengelola krisis-krisis sistemik yang mungkin timbul.

■ Kebijakan Sistem Pembayaran

Kebijakan sistem pembayaran nasional ke depan akan tetap diarahkan untuk mendukung ketahanan sistem keuangan dan mendorong efisiensi kegiatan ekonomi nasional. Kebijakan tersebut ditempuh melalui tiga langkah utama, yaitu meningkatkan kehandalan dan kemampuan mitigasi risiko sistem pembayaran nilai besar, meningkatkan efisiensi di sisi infrastruktur pembayaran retail, dan meningkatkan aspek keamanan pada industri Alat Pembayaran Menggunakan Kartu (APMK).

Untuk meningkatkan kehandalan infrastruktur dan kemampuan mitigasi risiko sistem pembayaran nilai besar, Bank Indonesia akan terus mengembangkan sistem Bank Indonesia *Real Time Gross Settlement* (BI-RTGS) Generasi II. Pengembangan sistem BI-RTGS Generasi II dimaksudkan untuk menambah fungsi sistem BI-RTGS dengan tujuan untuk meningkatkan efisiensi di sisi penggunaan likuiditas, efisiensi dan mitigasi risiko kebutuhan transaksi antar negara, maupun efisiensi dalam rangka mendukung transmisi kebijakan moneter dan fiskal. Pengembangan sistem BI-RTGS lebih jauh dimaksudkan untuk mempersiapkan infrastruktur sistem BI-RTGS agar dapat memfasilitasi transaksi *cross-border*, yang ke depan diperkirakan semakin berkembang karena adanya inisiatif pengembangan perekonomian dan pasar keuangan regional yang terintegrasi, seperti MEA pada tahun 2015. Untuk itu, ke depan sistem BI-RTGS tidak

lagi menggunakan mekanisme murni *gross to gross settlement*, tapi sudah mengkombinasikannya dengan sistem *netting*, atau lebih dikenal dengan *hybrid system*, sehingga diharapkan mampu meningkatkan efisiensi penggunaan likuiditas bagi peserta dalam sistem.

Untuk meningkatkan efisiensi di sisi infrastruktur pembayaran retail Bank Indonesia akan membentuk struktur kelembagaan sistem pembayaran retail di luar Bank Indonesia dalam bentuk *Self Regulatory Organization* (SRO) dan mendukung penciptaan infrastruktur pembayaran retail dalam format *National Payment Gateway* (NPG). Keberadaan SRO sebagai mitra Bank Indonesia dalam mengatur dan menjaga kelancaran sistem pembayaran dianggap penting agar industri dapat mengatur aturan main sendiri dari sisi industri, sepanjang tidak bertentangan dengan kebijakan umum di bidang sistem pembayaran. Hal itu karena pada dasarnya pelaku industri yang lebih memahami karakteristik bisnisnya, termasuk *risk appetite* masing-masing industri. Sementara itu, NPG merupakan suatu *switching* nasional untuk berbagai transaksi antar bank yang dilakukan melalui *front end delivery channel* seperti ATM, internet, telepon, dan *mobile payment*. Dalam rangka pengembangan NPG tersebut, langkah-langkah yang akan dilakukan oleh Bank Indonesia antara lain merumuskan strategi pengembangan, menyusun jadwal pengembangan, dan memfasilitasi pengembangan NPG melalui kebijakan dan regulasi yang akurat tanpa mengabaikan kemampuan dan kondisi industri. Dengan adanya NPG tersebut diharapkan efisiensi nasional dalam penyelenggaraan sistem pembayaran di Indonesia dapat segera ditingkatkan. Dengan demikian, pelaku industri tidak perlu mengembangkan infrastruktur sendiri-sendiri untuk kegiatan sistem pembayaran yang dilakukannya, namun hal tersebut dapat dilakukan dengan cara yang lebih efisien yaitu melalui *sharing* infrastruktur dengan pelaku industri lainnya.

Selain itu, Bank Indonesia akan terus meningkatkan aspek keamanan pada industri APMK dengan mendorong industri untuk menggunakan instrumen *chip* yang saat ini dipandang paling aman dibandingkan dengan teknologi pita magnetik. Khusus untuk kartu kredit, sampai akhir tahun 2009 seluruh penerbit sudah hampir menyelesaikan implementasi *chip*. Sedangkan untuk kartu ATM dan Debet, pada tahun 2009 baru dijajagi kemungkinan standarisasi instrumennya dan terlebih dahulu akan diujicobakan di beberapa penerbit besar sebelum diimplementasikan.

■ Koordinasi Kebijakan

Ke depan, Bank Indonesia akan semakin memperkuat koordinasi kebijakan makroekonomi dengan Pemerintah. Dalam perekonomian yang masih diliputi ketidakpastian, keterbatasan dimensi pengaruh kebijakan makroekonomi memberikan pelajaran mengenai betapa pentingnya peran koordinasi kebijakan antara Bank Indonesia dengan Pemerintah dalam mendukung pencapaian tujuan-tujuan kebijakan makroekonomi yang mensejahterakan rakyat secara optimal.

Pentingnya koordinasi kebijakan berkaitan dengan masih adanya beberapa permasalahan mendasar dalam perekonomian yang belum dapat diatasi dengan segera, seperti permasalahan struktural di sisi penawaran dan pembinaan UMKM. Koordinasi kebijakan Bank Indonesia dengan Pemerintah akan diprioritaskan pada upaya untuk mendukung penguatan kelembagaan ekonomi guna mendukung percepatan pembangunan infrastruktur untuk meningkatkan kapasitas produksi dan kegiatan perekonomian secara luas. Disamping koordinasi kebijakan moneter dan fiskal untuk stabilisasi makroekonomi, sejumlah langkah koordinasi tersebut dilakukan untuk meningkatkan hubungan investor luar negeri dan peringkat Indonesia, dukungan intermediasi perbankan, memperdalam sektor keuangan domestik. Kajian sektor-sektor ekonomi dan komoditas-komoditas unggulan melalui hasil survei maupun Kajian Ekonomi Regional (KER) juga terus dilakukan oleh Kantor-kantor Bank Indonesia di berbagai daerah. Dengan langkah tersebut, diharapkan perilaku sisi penawaran berada dalam pola yang cukup fleksibel dalam merespons perkembangan sisi permintaan, sehingga dukungan kebijakan ekonomi untuk mendorong proses pemulihan ekonomi dapat memberikan hasil yang optimal. Lebih lanjut, koordinasi kebijakan akan diarahkan untuk meningkatkan pembinaan kepada pelaku UMKM sehingga dapat meningkatkan akses UMKM pada perbankan.

Bank Indonesia juga akan secara aktif berkoordinasi dengan Pemerintah untuk mengatasi permasalahan kekakuan struktural dalam perekonomian yang berpotensi mengganggu efektivitas pelaksanaan kebijakan moneter. Untuk itu, di tingkat nasional, Bank Indonesia dan Pemerintah telah membentuk Tim Koordinasi Penetapan Sasaran, Pemantauan dan Pengendalian Inflasi (TPI). Di tingkat daerah, Bank Indonesia akan lebih

mengintensifkan upaya-upaya pengendalian inflasi di daerah dengan memberdayakan Kantor Bank Indonesia untuk bekerja lebih aktif lagi sebagai penggerak Tim Pengendalian Inflasi Daerah (TPID). Kerjasama dengan pemerintah daerah cukup penting guna mengidentifikasi dan mencari solusi atas berbagai permasalahan permasalahan struktural yang masih ada. Hal itu

mengingat faktor gejolak struktural yang mendorong inflasi merupakan faktor endemik yang terjadi di sebagian besar daerah. Dengan demikian, ke depan, kinerja TPID dalam menanggulangi gangguan inflasi di daerah akan semakin ditingkatkan kualitasnya serta diperluas lingkup cakupannya guna mendukung pertumbuhan ekonomi daerah dan nasional yang lebih berkualitas.

Boks 6.1 Kemajuan Kesiapan Menghadapi MEA

Dua tahun sejak ditandatanganinya cetakbiru Masyarakat Ekonomi ASEAN (MEA) 2015 dan ASEAN Charter 2007, implementasi kesepakatan menuju MEA 2015 terus bergulir. Satu tahapan penting berhasil dicapai dengan disepakatinya perjanjian yang mendukung terwujudnya aliran bebas barang, jasa, investasi, tenaga kerja dan aliran modal yang lebih bebas (lima elemen aliran bebas). Perkembangan tersebut semakin membulatkan tekad ASEAN untuk mencapai integrasi ASEAN yang lebih dalam sebagaimana dituangkan dalam kesepakatan “*Cham-am Hua Hin Declaration on the Roadmap for the ASEAN Community (2009-2015)*” dalam KTT ASEAN ke-14, Maret 2009.¹ Dalam deklarasi tersebut ditegaskan kembali bahwa pencapaian MEA sebagai salah satu pilar dalam ASEAN Community akan dilakukan berdasarkan cetakbiru MEA 2015 yang menggantikan *Vientiane Action Programme*. Pencapaian berbagai kesepakatan tersebut juga merupakan cerminan perkembangan ASEAN menuju organisasi kerjasama yang lebih efektif dan berlandaskan *rules-based*, sejalan dengan telah diratifikasinya ASEAN Charter oleh seluruh negara anggota pada 2008.

Di tingkat nasional, persiapan pencapaian komitmen Indonesia pada MEA 2015 dalam dua tahun pertama (2008-2009) dituangkan dalam Instruksi Presiden (Inpres) No. 5 tahun 2008 tentang Fokus Program Ekonomi (FPE) 2008-2009. Ketentuan tersebut difokuskan pada pemantauan komitmen pencapaian ASEAN sebagai pasar tunggal dan kesatuan basis produksi yang merupakan salah satu tujuan MEA 2015. Adapun tiga tujuan MEA lainnya adalah mewujudkan ASEAN sebagai i) kawasan ekonomi berdaya saing tinggi, ii) pertumbuhan ekonomi yang merata dan iii) kawasan yang terintegrasi dengan perekonomian global. Ketiga tujuan MEA tersebut saling terkait dan saling mendukung satu sama lain. Secara umum, Indonesia dapat memenuhi komitmennya sebagaimana tercemin dari dicapainya target *strategic schedule* cetakbiru MEA 2015 untuk periode 2008-2009. Selain itu, Pemerintah juga mengeluarkan kebijakan dan ketentuan untuk mendorong peningkatan daya saing nasional melalui

program peningkatan perdagangan dan perbaikan iklim investasi.

Perkembangan Implementasi Cetakbiru MEA 2015 Nasional

Implementasi cetakbiru MEA 2015 di tingkat nasional dikoordinasi oleh Pemerintah, yang dituangkan sebagai salah satu langkah Pemerintah di bidang ekonomi dalam Instruksi Presiden (Inpres) No. 5 tgl 22 Mei 2008 tentang Fokus Program Ekonomi (FPE) 2008-2009. Dalam Inpres tersebut Pemerintah melakukan pemantauan atas pelaksanaan komitmen Indonesia menuju pasar tunggal ASEAN dan kesatuan basis produksi di setiap elemen MEA 2015. Instansi yang bertindak selaku koordinator dan penanggung jawab komitmen MEA 2015 adalah Menteri Koordinator Bidang Perekonomian, sedangkan penanggung jawab ‘Sosialisasi Pelaksanaan Komitmen MEA 2015’ adalah Menteri Perdagangan.

Dari hasil pelaksanaan Inpres tersebut Indonesia sudah memenuhi komitmen di lima elemen aliran bebas barang. Untuk arus bebas barang, Pemerintah telah menerbitkan ketentuan mengenai penghapusan tarif bea masuk untuk produk dalam *Priority Integration Sectors (PIS)*², transparansi *non-tariff measures (NTMs)*, reformasi dan perluasan *rules of origin (ROO)*, dan penyederhanaan prosedur sertifikasi operasional ROO. Sementara, untuk arus bebas jasa, Pemerintah telah memenuhi komitmen *threshold* paket ketujuh *ASEAN Framework Agreement Services (AFAS)* untuk 68 sub-sektor, dari minimum 65 sub-sektor yang disepakati.

Berkaitan dengan aliran bebas investasi, Pemerintah sedang menyusun cetakbiru Strategi Pengembangan Penanaman Modal dalam menghadapi *ASEAN Comprehensive Investment Agreement (ACIA)* 2015 yang di dalamnya mencantumkan *Priority Action* dan tindak lanjut yang akan dilakukan berkaitan dengan liberalisasi aliran modal. Sementara dalam rangka pencapaian arus bebas tenaga kerja, saat ini sedang disusun peraturan

1 ASEAN Community terdiri dari tiga pilar yaitu ASEAN Political-Security Community, ASEAN Economic Community (Masyarakat Ekonomi ASEAN) dan ASEAN Socio-Cultural Community.

2 Priority Integration Sectors (PIS) terdiri dari produk—produk berbasis pertanian, karet dan kayu, penerbangan, otomotif, elektronik, e-ASEAN, perikanan, kesehatan, logistik, tekstil, dan pariwisata.

tentang kompetensi dan kualifikasi keahlian untuk pekerjaan dan pelatihan yang dibutuhkan khususnya di sektor yang telah disepakati untuk diliberalisasi (tenaga kerja profesional di bidang ‘*medical practioners*’, ‘*dental practioners*’, dan ‘*accountancy services*’).

Untuk arus modal yang lebih bebas, khususnya pasar modal, Indonesia telah menyepakati mengadopsi ‘*The ASEAN and Plus Standard*’ untuk penawaran umum efek bersifat ekuitas maupun efek utang lintas batas negara. Selain itu, Indonesia juga telah melakukan identifikasi dan asesmen ketentuan atas aliran modal berkaitan dengan FDI. Hasil identifikasi dan asesmen tersebut menunjukkan bahwa di Indonesia tidak terdapat hambatan dalam transfer modal lintas batas negara dalam rangka FDI. Ketentuan di Indonesia telah dapat menjamin dilakukannya transfer modal FDI dalam rangka pembayaran, konversi mata uang dan repatriasi hasil FDI.

Selain pemenuhan komitmen, Pemerintah juga mengeluarkan berbagai kebijakan peningkatan daya saing yang dikelompokkan dalam program: i) peningkatan perdagangan dan perbaikan iklim investasi, ii) peningkatan kerjasama dan diplomasi ekonomi, dan iii) program lainnya seperti perlindungan konsumen dan peningkatan industri kreatif. Kebijakan pertama dititikberatkan pada peningkatan daya saing produk Indonesia melalui: i) peningkatan perdagangan luar negeri melalui pengaturan dan pengelolaan barang ekspor/impor, pengawasan dan pengendalian mutu barang, serta fasilitasi perdagangan; ii) pengembangan produk dan akses pasar melalui penciptaan *brand*, identifikasi potensi ekspor, pengembangan produk, serta peningkatan kualitas dan kuantitas pelaku ekspor. Sementara untuk peningkatan iklim investasi di Indonesia, dilakukan langkah-langkah: i) peningkatan investasi dan penciptaan iklim usaha yang kondusif melalui reformasi kebijakan pendukung investasi, pengembangan kawasan perdagangan bebas dan kawasan ekonomi khusus, dan peningkatan pelayanan perizinan perdagangan bagi dunia usaha; dan ii) pengembangan infrastruktur lainnya melalui pembentukan lembaga sertifikasi, reformasi regulasi, harmonisasi regulasi pusat dan daerah, penyusunan regulasi yang disesuaikan dengan cetakbiru MEA 2015.

Kegiatan sosialisasi MEA 2015 di tingkat nasional yang dikoordinasikan oleh Departemen Perdagangan

mengacu pada ‘*ASEAN Economic Community (AEC) Communication Plan*’ yang disusun Sekretariat ASEAN. *AEC Communication Plan* merupakan panduan strategi dan taktik komunikasi sosialisasi yang bertujuan: i) menciptakan sentimen positif terhadap MEA 2015, ii) memberikan pemahaman mengenai manfaat MEA 2015 baik bagi dunia usaha maupun masyarakat; dan iii) memperoleh komitmen dari pemangku kebijakan untuk memenuhi kesepakatan tersebut.

Peran Bank Indonesia

Selain terlibat aktif dalam berbagai pertemuan kerjasama dan perundingan khususnya liberalisasi sektor jasa keuangan dan aliran modal yang lebih bebas, Bank Indonesia melakukan penelitian isu-isu MEA 2015 sebagai dasar penyusunan rekomendasi kebijakan yang berkaitan dengan ruang lingkup tugas Bank Indonesia. Penelitian tersebut meliputi dampak makroekonomi MEA 2015, strategi liberalisasi perbankan, dukungan sistem pembayaran, peningkatan akses UMKM terhadap perbankan dan aspek hukum perjanjian kerjasama di sektor keuangan. Penelitian tersebut dilakukan berkesinambungan selama tiga tahun (2009-2011). Pada tahun pertama (2009) penelitian difokuskan pada pemetaan kondisi Indonesia di antara negara anggota ASEAN lainnya. Dalam hal ini, hasil penelitian 2009 dengan fokus pemetaan kondisi makroekonomi dan daya saing perbankan menyimpulkan bahwa secara umum daya saing Indonesia termasuk di sektor perbankan masih perlu ditingkatkan agar dapat bersaing secara optimal dengan negara ASEAN-5 lainnya. Selanjutnya pada tahun kedua penelitian akan difokuskan pada pendalaman untuk menyikapi kesenjangan yang terjadi terutama terkait dengan daya saing perbankan. Pada tahun ketiga diharapkan dapat disusun cetakbiru atau *roadmap* persiapan Indonesia menuju MEA 2015 terutama di perbankan dan sistem pembayaran. Selain itu, Bank Indonesia bersama dengan Departemen Perdagangan dan Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian melakukan kegiatan sosialisasi “Persiapan Nasional Menuju MEA 2015”, dalam rangka meningkatkan kepedulian pada *stakeholder* atas peluang dan tantangan MEA 2015.